

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENINGKATAN KEJAHATAN HARTA BENDA DI FASE MENUJU BONUS
DEMOGRAFI RIAU 2030

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Strata Satu
Program Studi Kriminologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



DINGGA BAYU ATNHA SIAHAAN

NPM : 177510429

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Dingga Bayu Atuha Siahaan
NPM : 177510429
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : S1
Judul Proposal : Peningkatan Kejahatan Harta Benda di Fase Menuju
Bonus Demografi Riau 2030

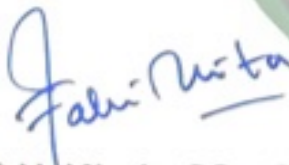
Format dan sistem pembahasan masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji sidang proposal.

Pekanbaru , 18 Maret 2022

Turut Menyetujui

Ketua Program Studi Kriminologi

Pembimbing



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim



Abdul Munir, S.Sos., M.Krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Dingga Bayu Atnha Siahaan
NPM : 177510429
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peningkatan Kejahatan Harta Benda Di Fase Menuju Bonus Demografi Riau 2030

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 6 April 2022

Tim Penguji

Sekretaris

Ketua Tim Penguji



Abdul Munir, S.Sos., M.Krim



Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Anggota



Askarial, S.H., M.H.

Mengetahui,

Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dingga Bayu Attha Siahaan
 NPM : 177510429
 Program Studi : Kriminologi
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Skripsi : Peningkatan Kejahatan Harta Bendawi Fase Menuju Bonus Demografi Riau 2030

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 6 Maret 2022

Tim Penguji

Ketua Tim Penguji

Sekretaris



Abdul Munir, S.Sos., M.Krim



Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

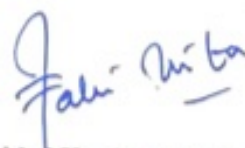
Turut Menyetujui.

Wakil Dekan I

Ka. Prodi Kriminologi



Indra Safri, S.Sos., M.Si



Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0201/UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 044/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- | | | |
|--------------------|---|--|
| Nama | : Dingga Bayu Attha Siahaan | |
| N P M | : 187510664 | |
| Program Studi | : Kriminologi | |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S.1) | |
| Judul Skripsi | : Peningkatan Kejahatan Harta Benda Di Fase Menuju Bonus Demografi Riau 2030. | |
- Struktur Tim :
- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Abdul Munir, M.Krim | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Rizky Novarizal, S.Sos., M.Krim | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Askariel, SH., MH | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. M. Zuhrawan, M.Sc | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Maret 2022
Dekan,


Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. Arsip (sk.penguji.krf.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor : 0201 /UIR-FS/KPTS/2022 tanggal 29 Maret 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Rabu tanggal 30 Maret 2022 jam 13.30 – 14.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Dingga Bayu Atnha Siahaan
 NPM : 187510664
 Program Studi : Kriminologi
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Peningkatan Kejahatan Harta Benda Di Fase Menuju Bonus Demografi Riau 2030.
 Nilai Ujian : Angka : " 85.4 " ; Huruf : " A "
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Abdul Munir. M.Krim	Ketua	
2.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Askarial,SH.,MH	Anggota	3. 
4.	M. Zulherawan . M.Sc	Notulen	4. 

Pekabbaru, 30 Maret 2022
 An. Dekan


Indra Safri, S.Sos. M.Si
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

KATA PENGANTAR

Shalom, Omswastiastu, Namó Buddhaya, Salam Kebajikan.

Dengan penuh rasa syukur yang begitu melimpah di dalam hati, dengan suka cita yang besar, penulis bersaksi bahwa kebaikan Tuhan atas kita adalah nyata. Kita patut berbangga dan bersyukur bahwa kita mengenal Tuhan yang mengasihi dan memahami setiap seluk beluk hidup kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Ia membuktikan kasih-Nya melalui berkat-berkat yang luar biasa, kesehatan, kepintaran, hikmat dan pewahyuan sehingga kita terhadap satu dengan yang lain dapat saling memberikan dampak yang baik dan saling mengaktualisasi di dalam cinta akan persaudaraan. Kiranya melalui kata pengantar ini, peneliti dapat menyampaikan seruan kemenangan bagi kita semua oleh karena satu lagi kesempatan bagi kita yang percaya telah melihat tuntunan-Nya melalui dunia Pendidikan. Peneliti sangat menyadari bahwa semua ini diperuntukkan bagi kemuliaan-Nya dan melalui panggilan-Nya sajalah kita dapat melihat betapa besar dan Ajaib-Nya apa yang Tuhan pikirkan atas kita umat-Nya. Bukanlah melalui sebuah pergumulan yang kosong peneliti dapat sampai dan menyelesaikan segala bentuk penelitian di dalam skripsi ini. Namun melalui Roh Kudus yang berbicara melalui hati setiap orang percaya, yang merenungkan Injil Kristus siang dan malam serta yang memikirkan apa tuntunan Tuhan bagi umat-Nya di akhir dari akhir zaman ini, peneliti dapat melihat secara jelas sebuah hal yang harus kita bahas dalam skripsi ini. Bonus Demografi merupakan sebuah momentum bagi kita

bersama-sama untuk dapat bergandengan tangan dalam memikirkan kesiapan dan kesejahteraan masyarakat Riau dalam menghadapi bonus demografi yang puncaknya ada di tahun 2028-2030. Berbagai kemungkinan dapat terjadi dan salah satunya adalah peningkatan kejahatan harta benda yang dapat terjadi sewaktu-waktu oleh karena kondisi lapangan yang kurang bersahabat. Untuk itu penting bagi kita untuk merenungkan bersama-sama bagaimana nantinya ketahanan sistem sosial ekonomi masyarakat pada fase bonus demografi hari-hari ini

Implikasi dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi sejatinya telah menjadi tanda bagi kita untuk tetap waspada, terutama kita harus membentuk satu pertahanan yang matang dalam menganulir serangan-serangan asimetris yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Tidak hanya dalam konteks ketahanan sosial politik saja, melainkan dari berbagai aspek bahkan aspek Pendidikan, agama, dan pemerintahan sekalipun.

Di dalam masa penulisan Skripsi terkait judul “**Peningkatan Kejahatan Harta Benda Di Fase Menuju Bonus Demografi Riau 2030**” Penulis bersyukur telah mendapat banyak kemudahan oleh karena perkenanan Tuhan Allah yang turun atas orang-orang yang ikut serta dalam penelitian ini. Dengan kerendahan hati dan penuh cinta, penulis menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada:

1. Tuhan Allah, Yesus Kristus yang menjadi satu-satunya sumber kehidupan, sukacita, kasih, kehangatan, dan kehidupan bagi peneliti. Dan oleh karena-Nya kita semua dapat menikmati apapun yang dipaparkan dalam penelitian ini. Ini semua sepenuhnya milik Tuhan, bagi Tuhan dan atas kehendak Tuhan saja.
2. Ayah dan Ibu yang peneliti cintai. Edi Susanto Pani Siahaan dan Febrina Olifia, S.Pd. yang telah mendedikasikan dan mengorbankan hati dan pikirannya untuk penulis. Dengan cinta memberikan waktu, perhatian, doa, serta yang selalu ada dimana pun dan kapan pun. Penghormatan setinggi-tingginya bagi orang tua yang saya sangat hormati di dalam cinta dan kehangatan.
3. Keluarga besar dari pihak Ayah dan Ibu yang telah memberikan dorongan dan semangat.
4. Bapak Pdt. Ricky Nelson Tampubolon, B.Th, S.Pak dan Ibu Pdm. Dr. Maya Irana Pohe, M.Pd. sebagai bapak dan ibu rohani terkasih yang telah mendidik, menuntun, mendoakan, memuridkan serta menyatakan visi misi Tuhan yang luar biasa atas generasi muda.
5. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL selaku Rektor dari Universitas Islam Riau
6. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswa Kriminologi Universitas Islam Riau.

7. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku Ketua Program Studi Kriminologi.
8. Bapak Ricky Novarizal, S.Sos., M.Krim selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi dan dosen yang selalu memberi dukungan, membimbing dan mengarahkan peneliti.
9. Bapak Askarial, S.H., M.H selaku Kepala Labor Kriminologi yang baik.
10. Bapak Abdul Munir, S.Sos., M.Krim selaku dosen pembimbing yang telah memberikan hati, waktu, dan perhatiannya bagi peneliti selama proses penelitian ini dimulai hingga diujikan pada ujian saat ini. Semua yang diberikan begitu indah dan teramat baik.
11. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendedikasikan waktunya bagi peneliti untuk belajar melihat apa yang Tuhan tuntun bagi peneliti melalui proses pembelajaran dan yang telah memberikan waktu dan tenaganya untuk mencerdaskan mahasiswa dan memberikan ilmu.
12. Bapak dan Ibu yang bertugas mulia pada tata usaha mahasiswa. Terima kasih atas bantuan dan dukungan bapak dan ibu dalam memenuhi kebutuhan administrasi mahasiswa.
13. Pihak Polda Riau, Dinas Penanaman Modal Provinsi Riau dan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau yang teramat sangat baik dalam memberikan pelayanan masyarakat serta memberikan informasi yang aktual dan terpercaya sehingga kita dapat menikmati bersama-sama hasil penelitian ini

14. Sahabat sejati dan keluarga rohani yang telah mendukung, menopang doa, membantu dan selalu ada ketika peneliti hendak membutuhkan sesuatu.
15. Keluarga kriminologi yang peneliti cintai, Kriminologi A terkhusus Jody Aldian yang peneliti hormati yang telah bersedia selalu untuk dijadikan tempat bertukar pikiran dan membantu memenuhi syarat-syarat penelitian. Fajar, Ravesh, Hilda, Lady, Mayanisa, Sakti, Pebi Noor, Kharris, Yehezkiel, Ilham yang telah ada bersama-sama dengan peneliti melewati suka duka selama bangku Pendidikan strata satu serta keluarga besar cafe Apung yang telah bersedia menjadi tempat bertukar pikiran.
16. Keluarga Besar Kriminologi baik senior dan junior yang telah memberikan kerja sama yang baik dalam masa berorganisasi, dan telah menjadi bagian dalam perjalanan pendidikan peneliti.
17. Terkhusus untuk Syarfan dan yang peneliti cintai Anggi Vinka yang telah memberikan hati, pikiran, waktu, tenaga dan semangat hingga penelitian ini benar-benar terselesaikan secara sempurna. Kiranya Tuhan memberkati kalian dan menambahkan berkat berlimpah-limpah atas kalian.

Penulisan penelitian ini tentu jauh dari kata sempurna. Namun satu hal yang peneliti Yakini bahwa semua adalah untuk kemuliaan-Nya saja. Kita adalah alat yang dipakai untuk kepentingan-Nya dan semua ini adalah milik-Nya saja. Dengan demikian peneliti meyakini bahwa apa yang Ia telah mulai, tidak akan pernah berhenti di tengah jalan. Ia yang telah memulai yang baik akan menyelesaikan pekerjaan-Nya melalui kita. Kiranya hasil dari penelitian ini akan membuka cakrawala berpikir dan menyadarkan secara sempurna setiap hati yang tertutup, setiap pemikiran yang terselubung. Kiranya Kasih karunia Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin.

Pekanbaru, 18 Maret 2022

Dingga Bayu Atnha Siahaan

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SK DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU	v
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
SURAT PERNYATAAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
BAB II STUDI KEPERPUSTAKAAN	20

A. Konsep.....	20
B. Kajian Terdahulu.....	37
C. Kerangka Teori	42
D. Kerangka Berpikir.....	47
E. Kerangka Konseptual	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
A. Metode Penelitian.....	62
B. Tipe Penelitian.....	63
C. Lokasi Penelitian	65
D. Pemilihan Sumber Informan.....	66
E. Teknik Pengumpulan Data.....	68
F. Analisa Data.....	69
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	70
A. Sejarah Singkat Provinsi Riau	70
B. Sejarah Pimpinan Provinsi Riau	73
C. Keunggulan Provinsi Riau dalam Bidang Ekspor-Import	77
D. Jumlah Masyarakat Provinsi Riau.....	79
E. Klasifikasi Masyarakat Berdasarkan Usia di Provinsi Riau	80
F. Kota-Kota di Provinsi Riau	81
G. Kondisi Sosial Ekonomi Provinsi Riau.....	81

BAB V HASIL PENELITIAN.....	83
A. Studi Pendahuluan.....	83
B. Pelaksanaan Penelitian	84
C. Elaborasi Variabel Angka Kejahatan Terhadap Harta Benda Provinsi Riau Tahun 2018-2020	85
D. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Modal Belum Memuaskan.....	94
E. Penjabaran	98
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN.....	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Presentase Angka Pengangguran Setiap Provinsi di Indonesia	6
Gambar 2. Tindak Kriminal di Masa Pandemi COVID-19	13
Gambar 3. Kerangka Berpikir	48
Gambar 4. Grafik Kejahatan Harta Benda Provinsi Riau Tahun 2018-2020.....	86
Gambar 5. Peringkat Sepuluh Besar Realisasi Investasi PMDN dan PMA Se-Indonesia Tahun 2020	94



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Penduduk Berdasarkan Usia Produktif dan Non-Produktif di Riau	8
Tabel 2. Angka Kejahatan Terhadap Hak/Milik Wilayah Polda Riau	10
Tabel 3. Jumlah Key Informan dan Informasi Penelitian	67



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Proposal yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dingga Bayu Atmha Siahaan
NPM : 177510429
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Program Pendidikan : Sarjana Satu (S1)
Judul Proposal : Peningkatan Kejahatan Harta Benda di Fase Menuju Bonus Demografi Riau 2030

Atas naskah yang didaftarkan pada Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bahwa bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Maret 2022



Dingga Bayu Atmha Siahaan

PENINGKATAN KEJAHATAN HARTA BENDA DI FASE MENUJU BONUS DEMOGRAFI RIAU 2030

Dingga Bayu Atnha Siahaan

177510429

ABSTRAK

Bonus Demografi merupakan sebuah momentum yang ditunggu-tunggu oleh banyak Negara tanpa terkecuali Indonesia. Beruntunglah saat ini Bangsa Indonesia memiliki kesempatan emas dan diberi kesempatan untuk mencicipi bagaimana rasanya memiliki sumber daya manusia yang melimpah di samping sumber daya alam yang juga melimpah. Namun tidak banyak dari kita mengetahui bonus demografi merupakan suatu lompatan besar bagi banyak negara untuk melakukan perubahan besar bagi negaranya sendiri. Tentu dibalik itu banyak simpul-simpul yang harus dipahami sebelum kita melangkah ke arah sana. Kita sebaik-baiknya harus memahami apa saja yang menjadi tolak ukur sebuah negara dapat sukses menjalankan prosesnya dalam pesta demografi. Apa hal yang mempengaruhi sebuah negara dapat melewati sebuah pesta bonus demografi dengan baik, dan apa-apa saja yang menjadi faktor penghambat hingga faktor apa saja yang dapat menjadi ancaman bagi masyarakat dalam konteks bonus demografi ini. Dalam penelitian ini kita akan menemukan implikasi-implikasi lain yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya dibalik dampak bonus demografi, dan hal ini ternyata dapat mengacu kepada gangguan sistem keamanan dan ketahanan aspek sosial dan politik sebuah masyarakat. Untuk itu perlu ditegaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang sejatinya harus diperhatikan dan dipelajari dengan saksama. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini berharap kita dapat mencerna berbagai informasi yang diberikan agar ke depan ini kita dapat melihat bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat dapat terjamin, dan kita dapat melihat stabilitas sosial ekonomi dapat selalu berada dalam kondisi baik.

Kata Kunci: *Bonus Demografi, Kejahatan Harta Benda, Stabilitas Sosial Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat, SDM*

INCREASING PROPERTY CRIME IN RIAU DEMOGRAPHIC DEVIDENT MOMENTUM UNTIL YEAR 2030

Dingga Bayu Atnha Siahaan

177510429

ABSTRACT

The Demographic Dividend is a moment that many countries have been waiting for, including Indonesia. Fortunately, Indonesian people now have a golden opportunity and they have the opportunity to feel and know what it is like to have bunch of human resources in addition to abundant natural resources. But not many of us know that the demographic dividend is a big leap for many countries to make big changes for their own country. Of course, behind that kind of situation, there are many knots that we should understand before we go down and doing the stuff. We must understand what is the benchmarks for a country to be able to successfully carry out its process in the demographic party. What are the things that influence a country to be able to pass a demographic bonus party well, and what are the inhibiting factors to what factors can be a threat to society in the context of this demographic dividend. In this study, we will discover other implications that we have never thought of before behind the impact of the demographic bonus, and this can actually refer to the disruption of the security system and the resilience of the social and political aspects of a society. For this reason, it is necessary to emphasize that this research is a research that should be considered and studied carefully. Therefore, the researcher in this case hopes that we can digest the various information provided so that in the future we can see that the welfare of the community can be guaranteed, and we can see that socio-economic stability can always be in good condition.

Keyword: Demographic Dividend, Property Crime, Socio-Economic Stability, Community Welfare,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara keilmuan, bonus demografi atau *demographic dividend* disinyalir sebagai momen terbaik bagi sebuah negara untuk mengalami sebuah lompatan besar mengacu pada pertambahan usia produktif secara signifikan. Di dalam fase ini, negara-negara yang mengalami bonus demografi pada dasarnya secara otomatis mengalami peningkatan persentase angkatan usia kerja. Artinya, masyarakat yang telah memasuki usia produktif jumlahnya akan lebih banyak dari pada eksistensi masyarakat yang tidak produktif. Ukuran produktivitas diukur berdasarkan usia 15 - 64 tahun. Dengan begitu, usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun, masuk dalam kategori tidak produktif. Dalam kurun waktu tahun 2030 Indonesia diproyeksikan akan mengalami usia produktif di atas 64 persen dari total jumlah penduduk 297 juta jiwa (Dokumen Bapennas, 2017) atau disebut sebagai puncak bonus demografi Indonesia.

Sepintas hal di atas terlihat menguntungkan dan sudah pasti kita akan berpikir bahwa dengan realitas yang demikian sebuah negara dapat dikatakan akan lebih mudah mencapai kata kemajuan oleh karena sumber daya manusia yang berlimpah. Disini letak kerisauan penulis untuk melihatnya lebih jauh. Ketika topik ini hendak diperbincangkan, respons rata-rata dari masyarakat hanya ‘sebatas tahu’

dan mengerti tentang bonus demografi tanpa ingin ataupun tertarik penjelasan terkait *devident* dari fenomena tersebut. Yaitu secara reflek munculnya sebuah “reaksi ringan” yang dikhawatirkan akan menjadi sebuah hal yang mendarah-daging pada masyarakat dalam mengukur dan memaknai seperti apa sebetulnya bonus demografi dalam pemaknaan yang spesifik.

Euforia dari bonus demografi terlihat tidak diimpartasikan dan dipahami secara baik oleh masyarakat sehingga ini menjadi *signal* kuat dari besarnya potensi kekacauan ketika nanti diperhadapkan dengan realitas mobilitas sosial dan ekonomi yang akan berlangsung tinggi dimasa bonus demografi itu. Gejala-gejala yang muncul tersebut adalah modal awal penulis untuk mengembangkan *issues* terkait dampak konkret yang akan muncul pada fase bonus demografi, yang sejatinya sudah mulai terlihat pada wilayah-wilayah di provinsi Riau.

Menyikapi isu bonus demografi ini, maka pemerintah dituntut harus lebih peka memperhatikan arah pembangunan daerah maupun bangsa di waktu-waktu yang akan datang. Tidak hanya berfokus kepada hal-hal material semata tetapi juga *human value* yang juga dianggap sebagai elemen penting dari sumber daya manusia. Hal ini lumrahnya dianggap mutlak dan penting agar setiap pihak yang terlibat dapat mengoptimalkan perannya masing-masing guna terciptanya kemajuan yang bermuara pada kesejahteraan kehidupan masyarakat di suatu wilayah/daerah. Dalam hal itu maka masyarakat umum harus dipandang sebagai bagian dari pilar utama (subjek) yang turut mempengaruhi kemajuan di saat mereka memiliki kualitas yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan dari

kebijakan pembangunan untuk kemajuan yang akan diprogramkan.

Dalam amatan penulis, setidaknya ada beberapa indikasi utama yang perlu diperhatikan dalam rangka menopang kemajuan bagi suatu daerah atau negara. Mengacu pada analisis jurnal yang ditulis oleh *Departement of Economics and Social Affair* (2013) :

- a. *While technology will play an important role in the transition to sustainable consumption, conscious efforts will still have to be made to move away from more resource-intensive to less resource-intensive consumption, from a private to public mode of consumption, from use of non-biodegradable to use of natural biodegradable material, and from unequal to more equitable consumption.*
- b. *Sustainable and equitable consumption patterns, with appropriate reorganization of the economy and society, including a redefinition of output and the sharing of productivity gains, can ensure income and employment and better quality of life for all.*
- c. *Human development will remain the main focus of developing countries post-2015. in this regard, the transition of developed countries to equitable and sustainable consumption will make it easier for developing countries to pursue their human development goals in a more environmentally sustainable way*
- d. *Some developing countries have been implementing initiatives directed*

towards sustainability that, so far, are more advance than those of developed countries , which suggests that developing countries can provide real leadership in transition to sustainability.”

Dengan demikian, menurut hemat penulis yang menjadi karakteristik dari sebuah kemajuan di sebuah wilayah dapat dikonklusikan menjadi beberapa indikasi di antaranya :

1. Adanya semangat perubahan dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan pokok yang ditumbuhkan berdasarkan kesadaran-kesadaran konkret dan lebih *valuable* akibat tingginya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap lingkungan sekitar, terhadap masyarakat yang tertinggal, dan terhadap keberlangsungan sebuah sistem sosial dalam konteks era yang sudah modern. Hal ini dipandang sebagai salah satu bentuk konkret dari aksi menciptakan suasana yang lebih harmonis dan efisien dalam semangat pembangunan keberlanjutan.
2. Regulasi dan sistem perekonomian yang tercipta efisien. Dengan demikian kehidupan masyarakat di sebuah wilayah dapat ditopang dengan sistem pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih merakyat dengan jaminan pembagian keuntungan yang adil baik secara materi ataupun non materi.
3. Visi dan misi yang berorientasi kepada pembangunan sumber daya manusia. Hal ini dikedepankan karena sumber daya manusia sudah pasti dipandang sebagai Salah satu aspek terpenting dalam mencapai sebuah mobilitas

ekonomi, sosial, dan politik di sebuah wilayah atau negara. Di samping itu juga, kualitas sumber daya manusia menjadi penentu dari seefisien apa sebuah wilayah atau negara dapat mengalami kemajuan dalam segala aspek hingga pemaknaan pembangunan berkelanjutan menjadi nyata ditengah-tengah masyarakat.

4. Sistem yang ada dapat menjadi nilai saing yang unggul bagi wilayah-wilayah atau negara-negara lain. Sehingga, pengujian secara tidak langsung terhadap sistem yang ada mampu menghasilkan prestasi terhadap nilai unggul yang dihasilkan dari sistem tersebut.

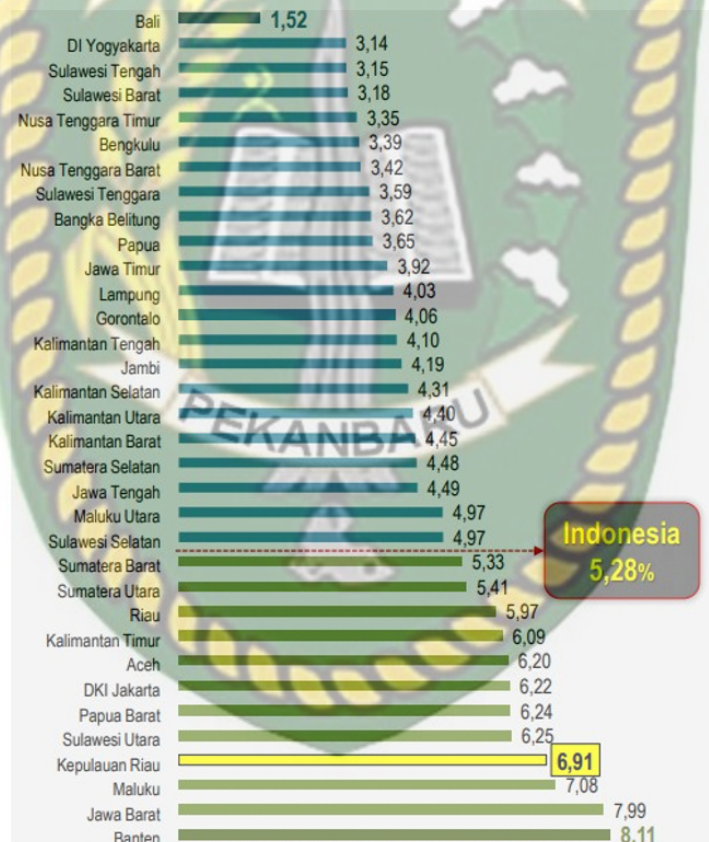
Sebagai pendahuluan, penulis perlu menerangkan bahwa ancaman terbesar dari persiapan yang tidak matang dalam menghadapi sebuah perubahan sosial yang drastis dan secara besar-besaran di saat bonus demografi adalah “*mental illness*”. Oleh karena hal tersebut memiliki dampak langsung pada kehidupan sosial serta ekonomi. Pernyataan ini didukung oleh Seth Mnookin (2016:7) yang berbunyi :

“There is also significant evidence showing that social condition associated with poverty creat stress and trigger menthal disorder, and the labor insecurity and the health care cost associated with menthal disorders in turn move many into poverty.”

Dalam prosesnya, tentu masyarakat yang tidak memiliki persiapan yang matang akan sangat mengalami kesulitan bersaing di dalam pekerjaan ataupun disaat-saat mencari pekerjaan nantinya. Situasi ini tentu harus menjadi isu yang harus dibaca secara cermat tidak hanya oleh pemerintah terlebih lagi masyarakat sendiri agar

memahami fenomena yang akan melanda wilayah atau negaranya.

Hal ini menjadi linear ketika penulis menyandingkan dengan fakta di lapangan menunjukkan 12 provinsi yang memiliki tingkat persentase pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia. Di antaranya adalah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, Aceh, DKI Jakarta, Papua Barat, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Maluku, Jawa Barat, Banten. Berikut adalah persentase masing-masing provinsi di daerah Indonesia.



Gambar 1. Persentase Angka Pengangguran Setiap Provinsi di Indonesia

(Sumber: Badan Pusat Statistik 2019)

Data BPS di atas memperlihatkan angka pengangguran di Riau berada pada urutan 10 tertinggi di Indonesia dengan angka 5,97 persen. Angka ini tentu terbilang cukup signifikan mengingat populasi penduduk Riau secara jumlah relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan provinsi-provinsi besar lain di Indonesia. Untuk jumlah penduduk Riau dalam tahun 2019 tercatat sejumlah 6.971.745 jiwa. Dari jumlah tersebut usia produktif yang diukur berdasarkan usia 15-64 tahun, berjumlah 3.186.222 jiwa. Sementara jumlah usia produktif yang bekerja berjumlah 2.996.079 jiwa. Dengan demikian, terdapat 190.143 jiwa dari usia produktif yang tidak bekerja (menganggur) di Riau. Sekali lagi perlu diterangkan, jumlah angka penganggur (190.143) ini menempatkan Riau berada di peringkat 10 se-Indonesia. Tentunya bukan persoalan angka yang menjadi masalah, namun persoalan sosial yang tidak diinginkan yang dapat muncul sebagai konsekuensi dari kenyataan itu. Untuk itu menurut hemat penulis perlu langkah terukur yang harus diambil Pemerintah daerah guna mengantisipasi dampak sosial dimasa yang akan datang sebelum tibanya waktu bonus demografi untuk daerah Riau yang dalam beberapa tahun ke depan, diproyeksikan mengalami lonjakan usia produktif mencapai 64-70 persen seiring dengan daerah lain di Indonesia. Berikut ini tabel data penduduk berdasarkan usia produktif dan non-produktif di Riau:

Tabel 1. Data Penduduk Berdasarkan Usia Produktif dan Non-Produktif di Riau

Kategori	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah Penduduk Provinsi Riau	6.657.911	6.814.909	6.971.745
Usia Produktif di Provinsi Riau	2.965.585	3.108.398	3.186.222
Usia Produktif yang Bekerja	2.781.021	2.915.597	2.996.079
Usia Produktif yang Tidak Bekerja (Pengangguran)	184.564	192.801	190.143

(Sumber : Diolah dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2019)

Dari data yang diperoleh di atas, perlu disadari bersama, bahwa baik data BRS tahun 2019 dan data BPS Provinsi Riau tahun 2019 seperti yang telah penulis sajikan, itu merupakan data dimana fase bonus demografi. Fase bonus demografi sendiri dimulai awal tahun 2020 hingga 2030. Pada fase itu diprediksi usia produktif di Indonesia mengalami peningkatan diangka 64-70 persen. Sementara kalau kita lihat usia produktif pada tabel penduduk Riau saat ini baru mencapai sekitar 45 persen dari jumlah penduduk.

Dapatlah kita bayangkan jumlah angka produktif dimasa bonus demografi itu nanti sekiranya tidak terkelola secara baik oleh pemerintah, melalui program-program yang dapat memfasilitasi ruang bagi para usia produktif untuk dapat bekerja dimasa akan datang, maka secara otomatis penambahan jumlah pengangguran akan bertambah secara signifikan dimasa yang akan datang. Padahal kita sama-sama memahami bahwa tingkat pengangguran yang tinggi memiliki pengaruh langsung

terhadap angka kejahatan di sebuah wilayah atau negara. Artinya kondisi sosial ekonomi masyarakat memiliki keterkaitan terhadap tingkat kriminal sebagaimana dikatakan J. Mitchell Miller (2009) : *“A number of theories rooted in labor economics and sociological criminology consider legitimate. Remunerative employment to be an important causal factor in the prevention of criminal behavior. Conversely, unemployment is believed to genuinely cause an increase in criminal activity”*

Mengacu pendapat J. Mitchell Miller (2009) menghubungkan kondisi ekonomi yang diakibatkan oleh status pengangguran dengan tingkat kejahatan, utama kejahatan terhadap hak /milik (pencurian) tentu sangat beralasan dan telah banyak dibuktikan juga oleh riset-riset yang berbicara tentang hal tersebut, seperti hasil temuan riset (skripsi) yang dilakukan Abdul Munir (2010) terhadap narapidana pelaku pencurian harta benda yang berada di Lapas Kelas II A Pekanbaru (Riau), menerangkan bahwa secara dominan ketiadaan penghasilan menjadi faktor tunggal dan alasan bagi narapidana melakukan kejahatan tersebut. Mencermati potensi kerawanan sosial sebagai dampak bonus demografi, perlu juga kita perhatikan jumlah angka kejahatan (*crime total*) dihubungkan dengan data penduduk yang ada saat ini pula. Untuk tahun 2018 saja, *crime total* yang tercatat di Polda Riau sejumlah 6.869 kasus, selanjutnya 7.246 kasus untuk *crime total* di tahun 2019 (Statistik Kriminal, BPS-RI 2018 dan 2019).

Dari *crime total* di 2 tahun terakhir, kejahatan terhadap hak/milik, menempati posisi tertinggi dan sangat mendominasi jika dilihat dari persentasenya hampir mencapai 50 persen di setiap tahunnya dari seluruh kejahatan (*crime total*) yang terjadi. Patut penulis dan kita semua duga, kejahatan terhadap hak/milik, merupakan manifestasi dari keterbatasan ekonomi atau tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang layak. Berikut ini tabel angka kejahatan terhadap hak/milik wilayah Polda Riau:

Tabel 2. Angka Kejahatan Terhadap Hak/Milik Wilayah Polda Riau

Tahun	Kejahatan Terhadap Hak/Milik		Jumlah
	Dengan Kekerasan	Tanpa Kekerasan	
2018	263 Kasus	2.389 Kasus	2.652 Kasus
2019	301 Kasus	2.333 Kasus	2.634 Kasus
2020	-	-	-

(Sumber : Diolah dari Statistik Kriminal BPS-RI 2018 dan 2019)

Oleh karena itu, risiko puncak bonus demografi dimasa mendatang datang dengan asumsi bertambahnya jumlah angka usia produktif mencapai 64 persen di Riau, tentu akan menjadi persoalan sosial besar sekiranya tidak tertangani dengan baik. Masalahnya angka pengangguran akan menjadi bertambah jauh lebih tinggi bahkan dapat tiga kali lipat dibanding saat ini. Situasi semacam inilah nanti yang dapat menstimulasi melahirkan frustrasi bahkan anomie bagi para penganggur jika dilihat dari perspektif kriminologi. Belum lagi saat ini, kita menghadapi pandemi Covid-19 yang sejatinya telah mengancam banyak jiwa, meruntuhkan banyak sistem sosial yang sejatinya telah *sattle* bercokol ditengah-tengah masyarakat saat ini.

Adanya perlambatan secara besar-besaran telah dialami berbagai wilayah di dunia bahkan di Indonesia sendiri. Dampak ini juga menjadi bagian dari faktor utama dari penghalang sebuah wilayah bisa secara efisien mempersiapkan wilayahnya dalam menghadapi berbagai **tantang** di masa **bonus demografi** yang akan datang.

Secara garis besar, kita telah melihat, bahwa **pandemi** saat ini telah memberikan *side effect* yang kompleks di berbagai sektor dalam masyarakat. Perputaran peradaban seakan-akan menjadi terganggu akibat adanya pandemi ini. Sebagai contoh, peneliti mengangkat sebuah jurnal yang membahas secara garis besar bahwa dampak Covid-19 telah membawa negara mengalami kerugian senilai 370 Triliun yang ditulis oleh 3 mahasiswa asal Surakarta yaitu Mutik Aromsin Putri, Rusi Septyananni, dan Aris Prio Agus Santos, mereka melaksanakan penelitiannya yang berjudul “DAMPAK COVID-19 PADA PEREKONOMIAN INDONESIA” dengan memanfaatkan metode pendekatan Yuridis serta teknik pengumpulan data dengan kuesioner dengan bentuk penelitian deskriptif. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa, ditemukan sejumlah fakta terkait **dampak** pandemi dalam konteks ekonomi yaitu:

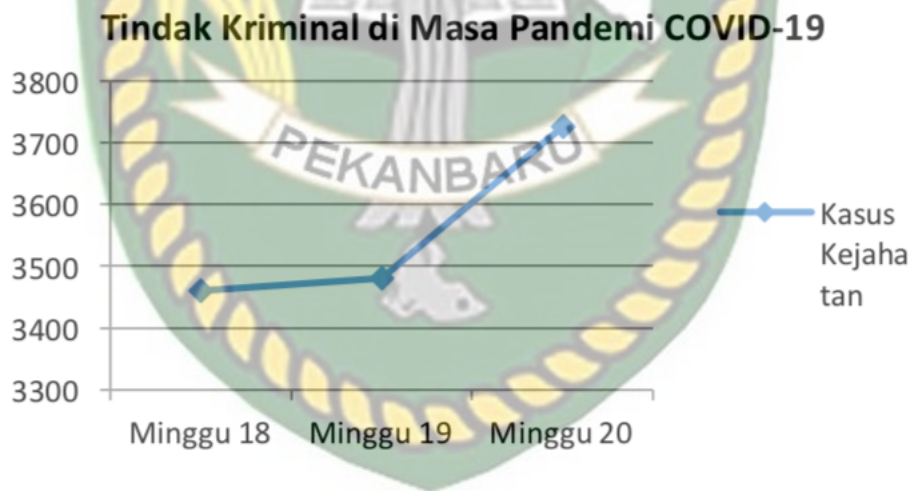
1. Banyak warga yang mengalami kesulitan akibat di PHK, diputus kontrak, ataupun dirumahkan tanpa digaji.
2. Ditemukan angka kejahatan meningkat.
3. Harga kebutuhan meningkat.
4. Menurunnya aktivitas ekspor-impor.

5. Penutupan berbagai sektor lapangan pekerjaan akibat perusahaan yang merugi.

Mari kita cerna bersama, saat ini pola masyarakat telah berubah. Penetrasi yang kuat dari pandemi ini telah mengubah kehidupan masyarakat. Kita mengetahui bahwa, saat kelompok sosial harus dipenetrasi dengan kondisi “*new normal*” hingga dengan terpaksa masyarakat harus kembali menyesuaikan diri dengan pola-pola kehidupan yang ada oleh karena struktur yang juga berbicara cara-cara menjalankan hidup haruslah berubah. Hal ini karena di dalam sebuah kelompok sosial terdapat struktur dan pranata sosial yang secara struktural merupakan elemen penegak dari kelompok sosial tersebut. Tekanan yang ditimbulkan akibat adanya pandemi ini mengharuskan berbagai bentuk pihak merubah pola aktivitasnya sehingga dengan demikian setiap kita terpaksa harus menyesuaikan kembali hidup setelah pandemi harus turun dan merajai wilayah Indonesia bahkan Riau untuk beberapa waktu. Tentu hal ini tidak selamanya efisien oleh karena setiap kesiapan mental masyarakat berada pada tingkatan yang berbeda. Ada yang mampu dan mapan, ada yang harus mengalami *brainstorming* besar-besaran dalam menghadapi situasi baru. Manifestasi dari situasi tersebut mengakibatkan masyarakat harus mengalami klasifikasi oleh karena pasti ada yang gagal dan pasti ada yang *survive*.

Berkaca dari hasil jurnal yang telah diterakan, kita dapat meresapi bagaimana kebingungan sosial terus menghantui masyarakat Indonesia yang tidak luput dari tuntutan hidup. Tidak hanya makan dan minum, namun juga keperluan lain

seperti hutang, keperluan dapur, keperluan mandi, keperluan badan, bahkan mereka-mereka yang juga harus mempertahankan wadah usahanya yang dimana di dalam itu juga terdapat sejumlah orang yang menggantungkan mata pencahariannya dari hasil surplus badan usaha tersebut. Stres sosial ini telah terbukti semakin runyam akibat dan mengakibatkan sejumlah masyarakat harus memilih jalan-jalan yang kurang tepat alias harus melakukan penyimpangan bahkan kejahatan oleh karena keterpaksaan akibat situasi. Hal ini dibuktikan dari meningkatnya jumlah kejahatan dan penyimpangan per tahun 2020 terhitung sejak ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi di seluruh Indonesia bahkan dunia. Berikut ini gambar tindak kriminal di masa pandemi Covid-19.



Gambar 2. Tindak Kriminal di Masa Pandemi COVID-19

(Sumber : Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19)

Jurnal Karya Izza Aliyatul Millah mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang membuktikan bahwa kejahatan yang terdapat di negara Indonesia mengalami peningkatan besar-besaran pada masa pandemi. Tentunya hal ini juga sudah pasti menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Hal yang serupa juga mengatakan bahwa kejahatan tersebut disinyalir kuat akibat dari perusahaan-perusahaan yang melaksanakan PHK besar-besaran, dan mengakibatkan korban PHK berserakan di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, kita mengingat juga bahwa terdapat pembebasan narapidana besar-besaran oleh karena kepentingan protokol kesehatan Covid-19.

Ini sejatinya memperkuat asumsi penulis bahwa semakin jelas terlihat jika bonus demografi akan kesulitan untuk dipersiapkan dengan matang baik pada tingkatan negara ataupun wilayah, kita akan mengalami sebuah gambaran yang semu terkait berhasilnya sejumlah besar wilayah di Indonesia mengalami keberhasilan melewati masa bonus demografi. Momok ini tentunya akan menjadi penghalang yang sangat merugikan negara. Melihat bagaimana kita dapat mengalami surplus yang baik namun dalam hal ini justru menjadi tidak terealisasi. Penulis melihat situasi ini sebagai salah satu hal yang dapat memperparah situasi anomi yang sejatinya sudah merongrong berbagai sektor dan simpul kehidupan sosial masyarakat Riau. Oleh karenanya, hal ini harus diantisipasi semaksimal mungkin agar kita dapat mengantisipasi dampak sosial yang lebih buruk lagi. Sangat diyakini jika kita mampu memahami ini, otomatis kita sejatinya mampu memahami *tension* dari pentingnya

menciptakan suatu suasana yang lebih kondusif di tengah masyarakat terutama memunculkan masyarakat-masyarakat yang dijadikan fasilitator bagi masyarakat yang lain dalam memenuhi segala bentuk keperluan satu dengan yang lain.

Maka dari itu, dalam konteks yang lebih meruncing, peneliti ingin menyajikan pandangan struktural terkait adanya ancaman kemunculan kejahatan harta (benda di sebuah wilayah yang dimana secara kontekstual dianggap tidak memberikan perhatian khusus dalam mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi pesta bonus demografi di tahun 2020-2045, dan pandangan ini dituangkan dalam bentuk penelitian yang memanfaatkan teori *anomie* dan menggunakan kondisi fakta lapangan sebagai elemen utama dalam menjabarkan kondisi tersebut lalu membuktikan pandangan berdasarkan konstruksi situasi yang telah tercipta berdasarkan elemen-elemen fakta lapangan, teori, dan sumber-sumber yang menjadi legitimasi dari penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Membahas bonus demografi menjadi kajian menarik dilihat dari sudut pandang kriminologi. Masalahnya pertambahan angka usia produktif yang di satu sisi oleh sebagian kalangan dianggap sebagai modal pertumbuhan ekonomi, namun dalam hal lain dapat menjadi masalah sosial yaitu peningkatan kejahatan harta benda bagi masyarakat akibat dari kalangan usia produktif yang tidak memiliki akses memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Anomi sendiri merupakan situasi

dimana harapan hidup yang didambakan tidak berbanding lurus dengan kenyataan yang dihadapi dalam proses mencapainya. Alhasil, pilihan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang oleh sistem sosial maupun hukum, dianggap sebagai penyimpangan bahkan kejahatan. Di samping itu, kita mengetahui bahwa pandemi virus Covid-19 ini telah mengakibatkan terjadinya kelumpuhan di berbagai sektor kehidupan manusia terutama manusia. Kecacatan ini telah membawa implikasi yang cukup berat bagi masyarakat Indonesia terutama masyarakat Riau dalam memenuhi kebutuhan hidup dan bertahan sebagai makhluk sosial. Dari rumusan masalah di atas, muncul pertanyaan dalam penelitian ini di antaranya :

- a. Apa penyebab peningkatan kejahatan harta benda dimasa persiapan dalam menghadapi bonus demografi di wilayah Riau?
- b. Bagaimana kejahatan harta benda mempengaruhi keberlangsungan Riau dalam menghadapi masa bonus demografi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendudukan kejahatan harta benda sebagai salah satu ancaman utama yang terjadi akibat minimnya kesadaran dari pihak terkait sebagai bukti persiapan terhadap sumber daya manusia di dalam menghadapi bonus demografi sekaligus dapat menjawab tantangan

pemerintah terkait kepentingan SDM ditengah-tengah resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 saat ini.

- b. Untuk mengetahui langkah konkret yang dapat diambil oleh *stakeholder*, pihak terkait setelah mendudukkan kasus sebagai pembeding.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini variatif dan progresif, namun peneliti memaparkan bagian-bagian penting yang dapat kita sadari bersama sebagai sekelompok masyarakat yang akan berkenaan langsung dengan penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini merupakan penelitian yang belum banyak dibahas, oleh karena penelitian ini menggunakan sudut pandang Kriminologi dalam menjawab tantangan *economic-social issues* bangsa Indonesia yang dimana akan menghadapi puncak bonus demografi di tahun 2030 dengan memanfaatkan situasi terkini yaitu masa-masa pandemi Covid-19 yang berimbas kepada resesi ekonomi, penelitian ini juga mendapatkan legitimasi untuk dijadikan acuan dalam mendeskripsikan secara konkret dan *fresh* terkait kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan dihadapi oleh masyarakat jika tidak kritis terhadap persiapan dan strategi dalam menghadapi kondisi sosial ekonomi dimasa yang akan datang.

Oleh karena penelitian ini dapat dieskalasi ke arah yang lebih kritis, maka manfaat penelitian ini secara teori dapat dijadikan acuan bagi para peneliti lain dalam mengembangkan *issues* seputar SDM, *Social-Politic*, Kriminologi dan penelusuran kasus-kasus kejahatan bermotif harta benda atau ekonomi. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam mengetahui dampak-dampak lain yang lebih luas yang mungkin dapat terjadi di dalam diskusi-diskusi kritis terkait penanggulangan *issues* ketenagakerjaan, kesejahteraan masyarakat, perekonomian negara di masa-masa resesi saat ini.

2. Manfaat Akademis

Dalam konteks manfaat akademis, penelitian ini adalah sebuah *legacy* bagi para peneliti selanjutnya, yaitu adik-adik tingkat yang peneliti hargai. Selain penelitian ini dapat dijadikan alat untuk memenuhi standar penilaian dan kelulusan oleh fakultas untuk mendapatkan gelar Sarjana Kriminologi, penelitian ini adalah acuan bagi rekan-rekan yang mengenyam pendidikan kriminologi dalam mengemukakan pandangan yang lebih kritis dan esensial terkait *issues* yang masyarakat hadapi hari-hari ini.

Sejatinya, Kriminologi memiliki sebuah pandangan yang luas dan kritis dalam mendeskripsikan situasi-situasi yang sulit dicerna oleh masyarakat awam dan penelitian ini ditulis atas dasar percaya bahwa Kriminologi sejatinya teramat sangat berpotensi menjadi salah satu literatur terkuat dalam mengemukakan pandangan kritisnya dalam panggung-panggung yang lebih luas. Semua ini

terbukti ketika peneliti berhasil menemukan suatu duduk perkara ini di dalam masa-masa bonus demografi berlangsung dengan mengonstruksi realitas yang dihadapi oleh masyarakat saat ini pada sisi SDM dan kesejahteraan masyarakat, terutama ditengah-tengah pandemi saat ini. Maka dari itu, keyakinan peneliti dalam ilmu kriminologi sangatlah kuat bahwasanya para kriminolog dapat menghasilkan pandangan-pandangan kritis mereka terkait *issues* yang dihadapi masyarakat melalui penulisan karya-karya ilmiah.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk mendudukan secara konkret permasalahan-permasalahan yang mendukung terjadinya *anomie* pada angkatan kerja provinsi Riau terutama ketika masa bonus demografi berlangsung. Pembuktian itu akan dirangkum ke dalam sebuah persentase karya ilmiah yang informatif sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembanding bagi para *stakeholder* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

STUDI KEPERPUSTAKAAN

A. Konsep

1. Kriminologi

Dalam kehidupan kita, tidak jarang kita menemukan suatu hal yang menjangkal. Kejanggalan-kejanggalan ini pastinya selalu menjadi pertanyaan banyak orang. Apalagi jika hal itu dipandang sebagai suatu kejanggalan yang kompleks dan perlu penjabaran khusus. Kriminologi dalam sejarahnya telah menjadi bagian dari literatur bagi setiap pihak yang memerlukan. Terutama di era masa kini. Era yang penuh dengan inovasi, percepatan pertumbuhan, dan lajunya pertukaran informasi yang mengakibatkan terlalu banyak sumber penetrasi bagi masyarakat bagi sistem kehidupan dan peradabannya. Di satu sisi, tentunya hal ini dapat dijadikan sumber potensi munculnya kejahatan-kejahatan dalam bentuk pola-pola yang progresif. Tak heran, sejak zaman dahulu, peneliti dan ilmuwan telah memulai langkahnya dalam mengembangkan berbagai asumsi dan penjelasan terkait fenomena-fenomena masyarakat dari masa ke masa oleh karena ingin mencegah ketidakterseediaannya penjabaran bagi masyarakat terkait apa yang mereka alami di dalam kelompok sosial mereka. Tentu hal ini haruslah menjadi jelas dan ringkas bagi kita terkait

apa peranan kriminologi dalam konteks yang lebih spesifik.

Kriminologi berasal dari bahasa asing yang dimana “*crimen*” berarti penjahat dan “*logos*” yang artinya adalah pengetahuan. Maka dengan demikian, Kriminologi atau dalam bahasa Inggris, *Criminology* adalah suatu ilmu yang membahas ataupun yang mempelajari tentang kejahatan, penjahat, pelaku kejahatan. Sejak awal, cabang ilmu pengetahuan ini diharapkan dapat mendeskripsikan secara gamblang mengapa, bagaimana, dan siapa suatu kejahatan dapat terjadi ditengah-tengah kelompok masyarakat. Para pakar dan ilmuwan kriminologi mula-mula, telah sepakat untuk meneliti berbagai perilaku masyarakat yang bersifat amoral, menyimpang secara ilmiah untuk dikembangkan lebih lanjut.

Dengan berbagai metode, para ilmuwan telah berhasil mengklasifikasi sebuah perilaku menyimpang dan menentukan berbagai perspektif yang harus digunakan dalam mendeskripsikan perilaku menyimpang tersebut dengan cara menghimpun berbagai studi dan keilmuan yang ada. Mengutip penjabaran teori *Sutherland* yang ditulis oleh Larry J. Siegel dalam bukunya yang berjudul “*Criminology Theory, Patterns, and Typologies Twelfth Edition*”, ada ruang lingkup penting yang harus dijadikan dasar bagi para pakar, penganut ilmu kriminologi, para cendekiawan kriminologi terkait konsep keseluruhan dari kriminologi itu sendiri. Hal ini di antaranya sebagai berikut:

“Sutherland and Cressy’s definition includes some of the most important

areas of interest to criminologists:

a. ***Crime as a social phenomenon although some criminologists***

Believe that individual traits and characteristics may play some role in the cause of criminals' antisocial behavior, most believe that social factors are at the root cause of crime. Even the most disturbed people influenced by their environment and their social interactions and personal relationship.

b. ***The Process of making laws***

Sutherland and Cressey's definition recognizes the association between crime and the criminal law and shows how the law defines crime. How and why laws are created and why some are strengthened and others eliminated is of great interest to criminologists.

c. ***Breaking laws and reacting toward the breaking of laws***

At its core, the purpose of criminology is to understand both the onset of crime and the most effective methods for its elimination. Why do people commit illegal acts, and what can be done to convince them and others who are contemplating crime that is in their best interest to turn their back on criminality? These concepts are naturally bound together it is impossible to effectively control crime unless we understand its cause.

d. ***Development of a body of general and verified principles***

Sutherland and Cressey recognize that criminology is a social

science and criminologists must use the scientific method when conducting research. Criminologists are required to employ valid and reliable experimental designs and sophisticated data analysis techniques or else lose standing in the academic community.”

Definisi Sutherland dan Cressey mencangkup beberapa bidang minat yang paling penting bagi para kriminolog :

a. **Kejahatan sebagai fenomena sosial meskipun beberapa kriminolog**

Percaya bahwa ciri-ciri individu dan karakteristik memainkan beberapa peran dalam penyebab perilaku anti sosial penjahat, sebagian besar percaya bahwa faktor sosial adalah akar kejahatan. Bahkan orang paling terganggu dipengaruhi oleh lingkungan mereka dan interaksi sosial dan hubungan pribadi mereka.

b. **Proses pembuatan undang-undang**

Definisi Sutherland dan Cressey mengakui hubungan antara kejahatan dan hukum pidana dan menunjukkan bagaimana hukum mendefinisikan kejahatan. Bagaimana dan mengapa undang-undang dibuat dan beberapa dikuatkan dan yang lainnya dihilangkan sangat menarik bagi para kriminolog.

c. **Melanggar hukum dan bereaksi terhadap pelanggaran hukum**

Pada intinya, tujuan kriminologi adalah untuk memahami permulaan kejahatan dan metode yang paling efektif untuk

penghapusan. Mengapa orang melakukan tindakan ilegal, dan apa yang dapat dilakukan untuk meyakinkan mereka dan orang lain yang sedang mempertimbangkan kejahatan yang merupakan kepentingan terbaik mereka untuk meninggalkan kriminalitas? Konsep-konsep ini secara alami terikat bersama, tidak mungkin mengendalikan kejahatan secara efektif tanpa kita memahami penyebabnya.

d. Pengembangan kumpulan prinsip umum dan terverifikasi

Shutterland dan Cressey mengakui bahwa kriminologi adalah ilmu sosial dan kriminolog harus menggunakan metode ilmiah ketika melakukan penelitian. Kriminolog diharuskan untuk menggunakan desain eksperimental yang valid dan dapat diandalkan serta teknik analisis data yang canggih atau kehilangan posisi di komunitas akademik.

2. Bonus Demografi

Berbicara bonus demografi, kita tidak lekang dari pengertian tentang “ledakan”. Bonus demografi sejatinya merupakan sebuah fenomena yang teramat sangat langka dan tidak akan pernah untuk yang kedua kalinya. Hanya sebagian dari sejumlah negara-negara di dunia yang mengalami bonus demografi, salah satunya adalah Jepang, Jerman, China, Rusia, dan India. Dalam penjelasan yang lebih rinci :

“the demographic dividend refers to the accelerated economic growth that begins with changes in the age structure of a country population as its transition from high to low birth and death rates” (Gibble and Bremner 2012:2). 2

Berarti bonus demografi cenderung mengarah kepada adanya sebuah akselerasi ekonomi oleh akibat dari perubahan struktur umur di sebuah negara yang perubahan struktur umur ini disebabkan oleh keadaan sebuah wilayah yang angka usia produktifnya jauh lebih tinggi di satu sisi angka kelahiran yang rendah serta angka kematian yang tinggi (angka kematian yang dimaksudkan mengarah kepada angka usia tua yang telah memasuki fase layu).

Fakta terbesar yang kita hadapi hari-hari ini adalah, Indonesia merupakan salah satu negara yang beruntung dapat mengalami bonus demografi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan BAPPENAS yang telah menyuarakan seluruh pihak untuk bersiap-siap dalam menyongsong bonus demografi ditahun 2030 yang dimana ditahun ini, Indonesia diproyeksikan telah mencapai puncak jumlah masyarakat yaitu sebanyak 297 juta jiwa dengan persentase usia produktif sebanyak 67%. (Sumber siaran pers Kementerian PPN/BAPPENAS 22 Mei 2017). Dalam penjelasan yang lebih spesifik, bonus demografi memberikan sebuah angin segar bagi negara dalam mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan, usia

angkatan kerja yang merupakan elemen terpenting bagi negara dalam mengalami keuntungan ada dalam jumlah yang besar. Pemanfaatan elemen ini tentunya dapat merealisasi harapan untung sebuah negara apalagi jika sebuah negara tersebut masih berada pada taraf negara berkembang. Namun tantangan dibalik bonus demografi ini sangatlah besar. Ini yang menjadi *concern* peneliti dalam menjabarkan dari adanya sebuah kemungkinan tertentu yang cenderung mengarah kepada muatan negatif di dalam proses berlangsungnya bonus demografi ini.

3. Angkatan Kerja (Usia Produktif)

Dalam pandangan yang spesifik terkait angkatan kerja, peneliti mengangkat pernyataan teoretis oleh Prof. Soemitro Djojohadikusumo dalam memandang dan berpendapat terkait angkatan kerja. Secara definitif, angkatan kerja merupakan bagian dari jumlah suatu penduduk yang memiliki pekerjaan ataupun sedang mencari kesempatan untuk melakukan suatu pekerjaan yang produktif. Di dalam definisi tentang angkatan kerja, Prof. Soemitro Djojohadikusumo menjelaskan tentang faktor-faktor angkatan kerja. Adapun faktor-faktor tersebut di antaranya:

a. Jumlah dan Sebaran Usia Penduduk

Penduduk yang usianya lebih dari batas tertentu dianggap termasuk dalam usia bekerja. Oleh sebab itulah mengapa mereka

disebut bagian dari angkatan kerja.

b. Pengaruh Keaktifan Bersekolah Terhadap Penduduk Usia Muda

Penduduk usia yang masih muda yang masih bersekolah tidak dianggap sebagai angkatan bekerja walaupun secara umur mereka sudah tergolong sebagai orang yang dapat memulai pekerjaan.

c. Peranan Kaum Wanita dalam Perekonomian

Seorang wanita yang bekerja sebagai IRT atau tidak memiliki pekerjaan di luar rumah tidak dianggap sebagai angkatan kerja. Namun jika wanita tersebut memiliki pekerjaan di luar rumah secara otomatis tergolong sebagai angkatan kerja.

d. Pertambahan Penduduk yang Tinggi

Setiap pertambahan jumlah penduduk secara bersamaan akan mempengaruhi jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja.

e. Meningkatnya Jaminan Kesehatan

Dengan peningkatan jaminan kesehatan, secara teknis umur rata-rata penduduk menjadi bertambah. Umur rata-rata yang terjamin tentu dianggap dapat memperpanjang produktivitas dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga secara otomatis dianggap dapat menambah jumlah angkatan kerja.

4. Pengangguran

Secara umum, kita dapat menyadari bahwa pengangguran merupakan *margin* dari suatu masyarakat yang tidak sedang dalam aktivitas bekerja ataupun mereka yang dalam usia angkatan kerja namun sedang mencari pekerjaan. Dalam sudut pandang kriminologi, pengangguran sendiri kerap dijadikan sebagai salah satu sumber kejahatan. Oleh karena pengangguran sendiri tercipta oleh beberapa faktor umum seperti kurangnya lapangan kerja menampung jumpa pelamar pekerjaan di suatu wilayah ataupun daerah, ketidakmampuan masyarakat bersaing dalam panggung dunia kerja, lemahnya persiapan dari pihak terkait, hingga keterbatasan akses informasi guna aktualisasi personal ke daerah-daerah terpencil juga menjadi sebab dari tereskalasinya fenomena pengangguran.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS seri statistik pengangguran) menjelaskan bahwa setengah dari pengangguran itu disebabkan oleh realita lapangan atau kondisi lapangan dari para pekerja tersebut. Hal ini dilihat dari pengalaman dan keterampilan bekerja seseorang, bagaimana individu mematuhi nilai dan norma, serta pengalaman bekerja dari seseorang. Di samping itu, kita melihat adanya keterbatasan lapangan pekerjaan dalam menyediakan lapangan pekerjaan, maka ada juga dari mereka yang harus secara terpaksa bersaing menerima pekerjaan yang sebetulnya *miss match* dengan keahlian individu setelah mereka keluar sebagai lulusan tertentu dari sebuah sekolah keahlian ditambah mereka pun harus bersaing dengan orang

yang sebetul-betulnya berkeahlian yang sesuai dengan pekerjaan yang sedang dipertarungkan.

Pemahaman tentang pengangguran atau *unemployment person* yang dikutip dari “*Economics for Investment and Decision Makers (Micro, Macro, and International Economics)*” menjelaskan:

“Unemployed are the people that actively seeking an employment but are currently without a job. Some that special subcategories include:

- a. Long term unemployed that the people who have been out of work for a long time or more than three to four months in many countries but are still looking for a job.*
- b. Frictionally unemployed are the people that not working at the time of filling out the statistical survey because they just left one job and are about to start another job. That is the frictionally unemployed have a job waiting for them and are not one hundred percent unemployed. It's just that they have not started the new job yet*

“Pengangguran adalah orang-orang yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi saat ini tidak memiliki pekerjaan. Beberapa subkategori khusus di antaranya :

- a. Pengangguran jangka panjang adalah orang-orang yang telah lama tidak bekerja atau tiga sampai empat bulan di beberapa negara tetapi masih mencari pekerjaan.

- b. Pengagaran friksional adalah orang-orang yang tidak bekerja pada saat mengisi survei statis karena mereka baru saja meninggalkan satu pekerjaan dan akan memulai pekerjaan lain. Artinya, pengangguran friksional memiliki pekerjaan yang menunggu mereka dan tidak seratus persen menganggur. Hanya saja mereka belum memulai pekerjaan baru.

5. Stres Sosial

Definisi *stress social* dapat dieskalasi menjadi beberapa partisi penjelasan. Hal ini dikarenakan *stress social* terdiri dari dua kawasan pengertian yaitu *stress* dan sosial. Stres menurut Hans Selye dalam karya tulisnya yang berjudul “*Stress in Healthy and Disease (1976)*” menyatakan bahwa:

- a. *In behavioral science, stress is regarded as the “perception of threat, with resulting anxiety discomfort, emotional tension and difficultu in adjustment.*
- b. *In the group of situation, lack of structure or loss of anchor “makes it difficult or impossible for the group to cope with the requirements of the situation and problem of leadership and interpersonal behaviour becomes one of evolving or supplying a structure or anchor and of the exprertness for coping with*

the demand of situation.

Statment ini memberi keterangan bahwa tekanan atau stress memiliki beberapa simpul yang menjadi faktor penentu agar stress dapat secara solid dikatakan sebagai sebuah fenomena. Hal ini di antaranya:

- a. Stres merupakan sebuah situasi yang dimana alam sadar manusia berada pada nuansa ancaman atau dalam kata lain stres adalah manifestasi utama saat manusia merasa berada pada suatu ancaman. Melalui hal itu, manusia mengalami pengaruh lain yang mengakibatkan timbulnya kecemasan, ketidaknyamanan, ketegangan emosional, hingga manusia sulit menyesuaikan diri.
- b. Jika di dalam sebuah kelompok, struktur yang di dalamnya terdapat berbagai aturan, tata, dan pranata yang dimana ini merupakan sebuah pancangan ataupun jangkar dalam tegaknya sebuah struktur dalam masyarakat tidak berdiri kokoh, maka sulit bagi kelompok tersebut untuk dapat bertahan ataupun memenuhi berbagai hal yang secara tipologi dianggap sebagai syarat situasi yang kelompok tersebut harus lewati. Singkatnya, jika masyarakat secara struktural tidak secara kohesif menjalankan sebuah proses sosial, maka akan muncul sebuah “*lag of knowledge*” satu dengan yang lain. Hal

ini tentunya membuat kita kesulitan dalam memenuhi persyaratan utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial.

Perilaku yang tidak bersifat kohesif ini tentunya tidak mencerminkan bagaimana sejatinya gambaran utuh dari struktur di dalam sebuah kelompok sosial serta perilaku yang tidak bersifat kohesif itu adalah cikal bakal munculnya jarak pemisah antara masyarakat yang secara knowledge mapan dan yang tidak mapan. Tantangan itu sendiri didefinisikan sebagai ragam fenomena masyarakat yang secara umum dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang lain seperti perkembangan peradaban, budaya, tingkah laku, teknologi, peningkatan berbagai jenis kegiatan masyarakat, hingga pesatnya arus berita, informasi dan pembaharuan konten hiburan dari tahun ke tahun. Inilah yang dalam pemaknaan lain disebut sebagai elemen-elemen atau hal-hal utama yang memengaruhi situasi peradaban sebuah kelompok masyarakat.

6. Perilaku Menyimpang

Dalam pandangan yang spesifik, perilaku menyimpang sejatinya memiliki implikasi. Salah satu implikasi dari perilaku tersebut adalah ancaman dan peningkatan rasa takut di tengah masyarakat. Dorongan seseorang dalam memutuskan untuk berlaku menyimpang tentu disebabkan

oleh beberapa faktor. Dalam hal ini penulis berinisiatif mengklasifikasikan beberapa faktor dari seseorang ingin melakukan Tindakan penyimpangan di antaranya adalah kebutuhan rumah tangga, kebutuhan *pride*, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang berkaitan dengan keberlangsungan eksistensi manusia. Kebutuhan ini beriringan dengan perkembangan peradaban manusia. Tak lekang juga hal tersebut juga terjadi di Indonesia. Kita melihat bahwa rata-rata dari para pelaku kejahatan menganggarkan alasan “kebutuhan hidup” dalam menjelaskan mengapa ia berlaku jahat di tengah masyarakat.

Secara umum kita melihat kebutuhan telah menjadi salah satu faktor krusial yang manusia tidak dapat sepelekan. Suatu perilaku dianggap menyimpang jika seseorang, dalam konteks kelompok telah melakukan sesuatu yang berada di luar pranata yang telah disepakati sebagai limitasi setiap individu dalam berperilaku ditengah-tengah masyarakat. Perilaku menyimpang yang dijabarkan oleh Frederick Howard Wines dalam buku terkenalnya yang berjudul *Punishment and Reformation* menjabarkan perilaku menyimpang ke dalam dua kategori, di antaranya:

1. Faktor subjektif

Merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang (merupakan sebuah sifat pembawaan yang sejak lama ada di dalam diri seseorang).

2. Faktor Objektif

Merupakan faktor yang sumbernya berasal dari luar seseorang atau individu. Hal ini dapat diartikan sebagai faktor yang datang dari lingkungan seseorang.

Dalam penjabaran yang dipandang dari sudut pandang sifat suatu penyimpangan, terdapat 2 jenis penyimpangan, di antaranya:

a. Penyimpangan Positif

Penyimpangan positif dianggap sebagai suatu penyimpangan yang berpotensi memberikan implikasi baik terhadap lingkungan dan penyimpangan ini tentunya dapat diterima sebagai pembelajaran yang baik bagi khalayak masyarakat.

b. Penyimpangan Negatif

Penyimpangan negatif merupakan penyimpangan yang berpotensi memberikan implikasi buruk terhadap lingkungan masyarakat. Tentunya penyimpangan ini sudah melanggar pranata sosial. Di dalam penjabaran lanjut, penyimpangan negatif terbagi atas 2 sub poin, di antaranya:

a) Penyimpangan Primer

Merupakan suatu penyimpangan yang dilakukan dengan temporer dan cenderung tidak

berulang-ulang.

b) Penyimpangan Sekunder

Suatu penyimpangan yang jelas terlihat dan sering terjadi bahkan berimplikasi buruk yang sudah pasti mengganggu orang-orang.

7. Kejahatan Harta Benda

Definisi yang dirangkum di dalam KUHP terkait kejahatan harta benda dapat kita lihat di KUHP pasal 362-367 dengan isi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda Sembilan ratus ribu rupiah....”. Kejahatan harta benda merupakan sebuah kejahatan yang berkaitan dengan pengambilan ataupun perampasan barang sesuatu yang bukan menjadi hak milik pribadi orang dengan cara melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai pranata sosial dan sebagai tolak ukur sesuatu dianggap jahat atau pun tidak. Di dalam buku *“Criminology a Sociological Introduction karya Eamon Carrabine, Pam Cox, Maggy Lee, Keen Plummer, dan Nigel South”* menjelaskan bahwa:

“Broadly Speaking, property crime involves stealing and dishonestly obtaining or damaging another’s property. Wheter tangible goods or intangible property.”.

Artinya ; “Secara garis besar, kejahatan harta benda melibatkan pencurian dan dengan cara yang benar, atau tidak jujur memperoleh, ataupun merusak property pihak lain, baik itu barang berwujud maupun barang tidak berwujud (kekayaan intelektual).”

Kejahatan harta benda merupakan sebuah perilaku menyimpang yang disebabkan oleh karena keinginan memiliki sesuatu yang bukan haknya dengan cara-cara kriminal selayaknya yang sudah tercantum dan dijelaskan di dalam undang-undang. Kejahatan harta benda secara spesifik terjadi oleh karena kebutuhan suatu benda bagi seseorang tinggi namun cara-cara untuk mendapatkan keinginan tersebut tidak tersedia sehingga seseorang harus melewati batas norma untuk menentukan apakah seseorang mampu memenuhi kebutuhannya atau tidak. Tentunya kejahatan harta benda adalah kejahatan yang paling sering terjadi di lingkungan kita. Dalam skala tertentu, jika kejahatan ini telah berlangsung dengan cara-cara yang lebih ekstrim, maka kericuhan situasi dan ancaman pidana sudah menjadi bagian utama dari kejahatan harta benda. Dalam keterangan yang lebih lanjut, kejahatan harta benda difaktor kan dengan berbagai macam alasan yang salah satunya adalah kebutuhan hidup yang sulit dipenuhi.

B. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian, penting bagi seorang peneliti dalam menentukan kiblat berdasarkan penelitian-penelitian yang searah namun telah dilaksanakan terlebih dahulu. Hal ini dipandang sebagai sumber pemberi legitimasi dan sumber bukti valid bahwa pengkajian ini sejatinya juga dirasakan, dan telah dipikirkirkan oleh orang lain diluar peneliti. Di samping itu kajian terdahulu sejatinya memberi dampak yang baik bagi karya tulis peneliti dalam menulis penelitian. Sebab di dalam kajian terdahulu kita dapat bercermin, mengidentifikasi bagaimana seorang peneliti sebelum kita merajut cara berpikir, alur berpikirnya, dan mengetahui berbagai alasan dari perspektif yang berbeda terkait tema penelitian yang diangkat. Dalam hal ini, peneliti mengangkat 3 penelitian yang muatan dari penelitian tersebut disimpulkan sejenis dan memiliki konsentrasi kajian yang seragam. Adapun penelitian tersebut di antaranya:

1. Edzhogal Tua Frans Purba dengan judul *“Analisa Dampak Bonus Demografi Terhadap Ketersediaan Lapangan Kerja di Kota Medan”* yang dilaksanakan pada tahun 2016. Beliau berasal dari fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatra Utara. Dalam kajiannya, beliau mengangkat bagaimana pengaruh bonus demografi di kota Medan terhadap jumlah lapangan pekerjaan dengan mengaitkan pengaruh rasio ketergantungan terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan, pengaruh jumlah tenaga kerja ataupun angkatan

kerja terhadap jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, serta Edzhogal mamporyeksikan ketersediaan lapangan pekerjaan di tahun 2015-2030 di kota Medan. Edzhogal memanfaatkan metode deskriptif kuantitatif dalam memperjelas dengan presisi setiap *ratio* yang tertera dalam data *statistic* terkait angka usia kerja di kota Medan. Lapangan penelitian terlampir yaitu di kota penelitian. Penelitian mendapatkan hasil bahwa ada pengaruh terhadap lapangan pekerjaan. Terdapat pengaruh dependensi ratio negatif terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan dan tidak significant, namun yang mengejutkan terdapat peningkatan angka pertumbuhan angkatan kerja melalui proyeksi tren pertumbuhan angkatan kerja ditahun 2015-2030. Ini tentunya memberikan legitimasi bahwa peningkatan angkatan kerja sudah terlihat bahkan ditahun 2015, yaitu 5 tahun sebelum penelitian ini dilaksanakan.

- B. Rismawati dengan judul *“Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Angka Kemiskinan di Kabupaten Gowa”* yang dilaksanakan pada tahun 2018. Rosmawati berasal dari fakultas ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitiannya membahas tentang bagaimana pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan kesehatan di Kabupaten Goa terhadap angka kemiskinan. Kemiskinan sejatinya hal yang paling dihindari oleh karena kehidupan yang sulit untuk dijalani. Kebutuhan hidup sulit

dipenuhi dan kontribusi pemerintah juga salah satu faktor penyebab angka kemiskinan di dalam penelitian ini tidak mengalami perubahan yang signifikan ke arah positif. Rosmawati menghubungkan angka penduduk Kabupaten Goa, kondisi Pendidikan, serta mendudukan angka kemiskinan di Kabupaten Goa dan menemukan hasil bahwa adanya pengaruh negatif terhadap orang-orang miskin Kabupaten Goa terhitung dari tahun 2007-2016. Tingkat pendidikan di Kabupaten Goa terhitung baik walaupun yang dapat dianggap sebagai penerima jaminan upah layak hanya mereka yang terhitung lulusan di atas SD dan SMP. Dan dari data kesehatan yang dimiliki, usia harapan hidup di kabupaten Goa terhitung baik dan diharapkan melalui ini, kemiskinan yang notabene dipengaruhi oleh jumlah penduduk ini dapat tertanggulangi oleh karna ada jaminan kesehatan yang baik. Peningkatan kesehatan masyarakat Goa dipastikan mempengaruhi kualitas SDM Kabupaten Goa sehingga hal tersebut berpotensi meningkatkan produktivitas angkatan kerja Kabupaten Goa. Peneliti menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*) yang berorientasi pada pengumpulan data melalui bacaan laporan, data-data terkait konten penelitian, teori, ataupun jurnal yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Tentunya, setelah berkaca dari penelitian ini, peneliti mendapatkan bahwa adanya pengaruh dari aspek pemerintahan, kesehatan, dan jumlah penduduk terhadap kondisi masyarakat dalam hal ini kemiskinan. Tentunya hal ini sangat-sangat berkaitan dengan kondisi sebuah wilayah dalam menghadapi bonus demografi terutama dimasa pandemi saat ini.

C. Aulia Rahma dengan judul “*Analisa Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kota Batam*” yang dilaksanakan pada tahun 2019. Aulia Rahma berdomisili di Batam dan mengenyam pendidikan (alumni) sebagai Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Medan. Dalam penelitiannya, Aulia Rahma mengatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan secara total dan maksimal suatu wilayah dan Pengangguran menjadi salah satu masalah makro ekonomi yang secara langsung mempengaruhi proses sosial di suatu wilayah. Peneliti Aulia Rahma berusaha mencari masalah pengangguran di kota Batam yang mengalami fluktuatif setiap tahun hingga dikatakan pada tahun 2017 tingkat pengangguran kota tersebut telah mencapai 10%. Di samping pertumbuhan ekonomi kota Batam cenderung mengalami penurunan, tingkat inflasi yang cenderung fluktuatif bahkan upah

minimum yang terus mengalami kenaikan setiap tahun. Aulia Rahma menggunakan pendekatan empiris yang merupakan metode yang menganalisis gejala sosial dan alam dengan metode kuantitatif guna mendapatkan angka yang presisi. Peneliti menggunakan fenomena-fenomena serta menghubungkannya. Menggunakan jenis data kuantitatif yaitu data-data yang berbentuk angka dengan alasan pengukuran yang kredibel serta dapat dihitung secara langsung, data diperoleh dari Badan Pusat Statistik kota Batam. Menggunakan populasi wilayah kota Batam dengan sampel pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah, dan pengangguran pada tahun 2000-2017 yang diperoleh dari BPS Batam. Aulia Rahman mendapatkan hasil bahwa pada akhirnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan upah memiliki pengaruh yang simultan. Berarti berdasarkan angka yang sudah dicari, hasil menunjukkan adanya penurunan tingkat pengangguran di kota Batam sebesar 0,52 persen ketika pertumbuhan ekonomi meningkat 1%, peningkatan 0.15 persen akibat 1% kenaikan inflasi, penurunan tingkat pengangguran 0.47 persen setiap kenaikan 1% upah minimum. Ini menandakan bahwa kesejahteraan dari sektor pendapatan, kesehatan, inflasi ekonomi, serta pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penentu efisiensi sebuah wilayah berjalan.

Adanya interaksi dari tiap-tiap angka kredibel ini memberikan legitimasi bagi peneliti dalam menekankan bahwa ada hubungan yang

spesifik terkait kesejahteraan rakyat dengan efisiensi kondisi sebuah wilayah dimasa bonus demografi terutama dari perspektif dari tingkat pengangguran dan kemiskinan.

C. Kerangka Teori

Dalam kajian ini, peneliti sangat memahami semua bahwa variabel peningkatan angka kejahatan harta benda sejatinya datang dari satu ataupun lebih dari satu fenomena. Fenomena-fenomena ini dihimpun dan saling memberikan pengaruh. Hal ini tidaklah lepas dari aktivitas kita sehari-hari. Kita sering melihat sebuah hal muncul oleh karena suatu atau pun beberapa situasi mungkin terjadi di saat yang bersamaan. Karakteristik setiap situasi dipandang saling mendukung sehingga kita meyakini bahwa ketika dua jenis hal tersebut terjadi, maka kita mendapatkan suatu fenomena baru yang muncul. Mengenai hal ini, peneliti menghubungkan terminologi ini kepada situasi yang lebih faktual. Kita dapat melihat bahwa Indonesia sejatinya telah mengalami berbagai gejolak akibat pergerakan dinamis dari peradabannya. Indonesia telah berkembang dengan berbagai manifestasi di dalam prosesnya. Perkembangan dan pergerakan yang sudah berlangsung ini sudah menghasilkan berbagai jenis fenomena. Fenomena tersebut sangat kompleks dan luas. Fenomena secara mendasar datang dari dua fenomena pula. Dan hal ini akan berlangsung hingga kita melihat sekian ratus bahkan lebih fenomena di suatu wilayah.

Keberlangsungan perkembangan dari tiap-tiap jenis fenomena tentunya harus dapat dipacu. Hal ini pastinya disebabkan oleh campur tangan perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi yang dimana hal ini memberikan kontribusi yang kuat bagi peradaban dan budaya. Ini merupakan tantangan yang berat jika tidak banyak dari masyarakat memilih untuk mempelajari dan berkontribusi dalam menjaga tempo perkembangan suatu fenomena perilaku, kebiasaan, pola interaksi sosial di masyarakat. Melalui hal ini pula peneliti dalam menarik suatu jalur perenungan terkait peningkatan angka kejahatan harta benda dimasa bonus demografi.

Oleh karena proses perjalanan itu sudah memberikan tanda yang kuat dengan angka usia kerja yang semakin meningkat tiap tahunnya, peneliti berusaha mengkaitkan kondisi ketidakmapanan suatu daerah (dalam kasus ini Riau) dengan “*requirement condition*” yang sejatinya menjadi patokan bagi sebuah wilayah dalam melewati fase bonus demografi tersebut. Pergesekan antara realita lapangan dengan “*requirement condition*” dari konstruksi situasi inilah yang menghasilkan suatu fenomena ditengah masyarakat dan fenomena tersebut salah satunya adalah peningkatan kejahatan harta benda.

Untuk membuktikan situasi ini, peneliti membutuhkan teori sebagai landasan dalam proses pembuktian fenomena kejahatan harta benda yang dimungkinkan akan meningkat seiring berjalannya masa pandemi Covid-19 saat ini dan perjalanan menuju puncak bonus demografi ditahun 2030 mendatang.

Sepanjang penelitian ini, peneliti memilih teori *Anomie* sebagai dasar dalam mendeskripsikan situasi yang diteliti dalam penelitian ini. Dalam kajian terdahulu, *Anomie* merupakan istilah yang dicetuskan oleh Emile Durkheim. Durkheim menjelaskan bagaimana situasi sosial berada pada suatu kondisi disintegrasi sosial. Hal ini disebabkan oleh karena perkembangan suatu peradaban, budaya, gaya hidup di dalam sebuah kelompok sosial. Hilangnya prinsip esensial dari sebuah struktur yang dimana di dalam hal tersebut terdapat keteraturan dan ketertiban sosial berakibat pada tidak lagi ditaatinya aturan-aturan sosial yang bersifat umum, normatif dan mempengaruhi koehesifitas manusia sebagai makhluk sosial yang terintegrasi oleh norma dan aturan yang mengikat. Ditengah-tengah pusaran inilah muncul sebuah kondisi yang dinamakan *Anomie*.

Maka dapat disimpulkan *Anomie* merupakan kondisi dimana adanya suatu perubahan sosial yang kompleks dan meluas, mempengaruhi struktur sosial dan menekan tinggi kesenjangan sosial. Sehingga akibatnya menimbulkan terjadinya persaingan antar individu akibat kriteria sosial baru di dalam peradaban yang berkembang. Emile Durkheim mengatakan bunuh diri merupakan puncak akhir dari kondisi *anomie*. Tentunya hal ini dikarenakan dari dua kondisi utama yaitu integrasi sosial dan regulasi yang mengalami degradasi dan perubahan. Deregulasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, perubahan ketentuan dan berkurangnya orientasi integrasi ditengah masyarakat inilah yang menjadi penyebab munculnya stress sosial. Sehingga masyarakat akhirnya memutuskan untuk bertindak

melampaui nilai dan norma. Menurut Emile Durkheim, situasi ini disebabkan oleh beberapa hal di antaranya:

1. Manusia merupakan makhluk sosial.
2. Eksistensi manusia sebagai makhluk yang bersosial.
3. Pola kehidupan manusia cenderung bersifat koloni dan saling bergantung satu dengan yang lainnya.

Di dalam buku “*Social Theory and Social Culture* karya Robert K. Merton” (1968), Rober K.Merton mengembangkan *template* berpikir Emile Durkheim dalam menjabarkan penelitiannya ke dalam kejahatan-kejahatan praktis hingga fenomena bunuh diri yang kerap terjadi dimasanya di kota-kota besar Amerika.

Disimpulkan bahwa struktur sosial yang diuji telah menghasilkan berbagai jenis ketegangan terhadap *anomie* dan perilaku menyimpang. Tekanan yang datang dari tatanan sosial yang baru akibat perkembangan proses sosial di tengah masyarakat memunculkan sensasi ingin mengalahkan pesaingnya. Selama sentimen menjadi dasar yang meliputi sistem, maka sensasi persaingan ini justru akan terdistribusi ke seluruh rangkaian kegiatan masyarakat. Dalam situasi yang lebih kompleks, terdapat situasi yang keliru dimana kepuasan datang dari nuansa persaingan yang tercipta di dalam struktur sosial yang sudah berubah. Secara otomatis, hal ini telah berubah menjadi suatu peraturan ataupun tren yang baru dan secara tidak langsung, situasi tersebut menjadikan tekanan, ketakutan, dan rasa

persaingan yang tinggi akibat takut akan ketinggalan telah menjadi satu-satunya agen pengatur di dalam struktur sosial. Ketegangan inilah yang menjadi cikal bakal dari munculnya suatu kondisi *anomie*. Tujuan atau *goals* adalah produk dari struktur sosial. Di dalam struktur tentunya manusia melakukan proses sosial dan menghasilkan berbagai jenis kepentingan yang termasuk di dalamnya adalah kepentingan makan, minum, kepentingan rohani, jasmani, dan sejenisnya.

Oleh sebab itu, dalam kasus ini, peneliti memilih penjabaran dari Emile Durkheim terkait yang dipertegas oleh Robert K. Merton terkait penjabaran tentang *anomie*. Kondisi *anomie* ditengah masyarakat sejatiya muncul akibat dari adanya berbagai tekanan (*stress* sosial) ditengah masyarakat akibat perubahan berbagai standar bertahan hidup masyarakat. Perkembangan budaya saat ini sejatinya semakin memperkuat hadirnya pembaharuan yang cepat di tengah masyarakat yang sedang mempertahankan hidup. Potensi-potensi umum ini menjadi indikasi kecocokan teori *anomi* diaplikasikan ke dalam penelitian kali ini.

Secara sederhana, teori ini akan menjabarkan sebab akibat suatu fenomena di tengah masyarakat termasuk variabel utama dari yang diteliti kali ini yaitu fenomena kejahatan harta benda. Dalam hal ini, kejahatan harta benda disebabkan oleh 3 faktor di antaranya:

1. Kesulitan masyarakat dalam bersaing di dunia pekerjaan akibat keterbelakangan informasi, ketinggalan kemampuan, dan

keterbelakangan informasi terkait pekerjaan serta pandemi Covid-19 di Riau.

2. Penetrasi yang tidak signifikan dari pihak terkait. Dalam hal ini pemerintah dan lembaga-lembaga yang berkesempatan mengaktualisasi masyarakat yang tertinggal terhitung kurang sehingga kurangnya perhatian bagi sebagian warga dari pemerintahan.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir secara umum merupakan sebuah *template saddle* yang dipakai oleh seseorang dalam menganalisis sebuah fenomena. Di dalam kerangka berpikir terdapat berbagai jenis teori yang disusun dan dihubungkan suatu bab yang dipandang sebagai acuan dalam menjelaskan sebuah fenomena. Menurut Sugiyono (2017) beliau mengemukakan bahwa kerangka berpikir adalah model konseptual yang berbicara tentang hubungan suatu teori dengan berbagai faktor yang telah diteliti dan diidentifikasi sebagai suatu permasalahan yang penting. Dalam hal ini, peneliti yang mengangkat judul “Faktor Penyebab Peningkatan Kejahatan Harta Benda di Masa Bonus Demografi Riau” dengan memanfaatkan kerangka berpikir yang telah dikiblatkan melalui teori yang sudah dijabarkan pada poin sebelumnya. Adapun kerangka berpikir tersebut ialah sebagai berikut

Peningkatan Kejahatan Harta Benda di Fase Menuju Bonus
Demografi Riau 2030-2040

Teori Anomie

Kesulitan bersaing dan
kondisi pandemi Covid-19

Kurangnya penetrasi dari
pemerintah dan lembaga
terkait

Tidak mampunya sebagian
masyarakat bersaing dalam
konteks teknologi

Kesulitan dalam persaingan
di panggung pekerjaan era
modern

Kurangnya pengetahuan
tentang informasi terkait
lapangan atau kesempatan
bekerja bagi sebagian
masyarakat

Gep antara masyarakat
yang belum mendapatkan
skill dan *keterampilan*

Edukasi langsung ke tengah masyarakat yang dianggap sebagai
bentuk penetrasi tidak menunjukkan hasil yang memuaskan
yang dapat dilihat dari masih adanya orang yang tidak
memahami inovasi dalam pekerjaan di masyarakat

Gambar 3. Kerangka Berpikir

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah sejumlah *template* berpikir dalam menganalisis suatu karakteristik, yang menjelaskan suatu objek ataupun gejala, hingga suatu situasi yang dinyatakan ke dalam suatu kata dan simbol. Di dalam penelitian ini, peneliti memaparkan beberapa kerangka konseptual yang diyakini *absolute* dalam menjabarkan situasi yang berlaku dan yang dibahas. Hal itu di antaranya:

A. Konsep Kriminologi

Kriminologi berasal dari Bahasa asing yang dimana “*crimen*” berarti penjahat dan “*logos*” yang artinya adalah pengetahuan. Maka dengan demikian, Kriminologi atau dalam Bahasa Inggris *Criminology* adalah suatu ilmu yang membahas ataupun yang mempelajari tentang kejadian, penjahat, pelaku kejahatan. Dalam kajiannya kriminologi secara garis besar dibahas kedalam satu informasi sebagai berikut:

- a. *Crime as a social phenomonom although some criminologists believe that individual traits and characterostics may play some role in the cause of criminals' antisocial behavior, most believ that social factors ar at the root cause of crime. Even the most disturbed people influenced by their environment and*

their social interactions and personal relationship.

b. The Process of making laws

Shutherland and Cressey's definition recognizes the association between crime and the criminal law and shows how the law defines crime. How and why laws are created and why some are strengened and others eliminated is of grat interest to criminologists.

c. Breaking laws and reacting toward the breaking of laws

At its core, the purpose of criminology is to undersand noth the onset of crime and the most effective methods for its emlimination. Why do people commit illegal acts, and whats can be done to convince them and others who are contemplating crime that is in their best interest to turn their back on criminality? These concepts are naturally bound together it is impossible to effectively control crime inless we understand It's cause.

d. Development of a body of general and verified principles

Sutherland and Cressey recognize that criminology is a social science and criminologists must use the scientific method when conducting research. Criminologists are required to employ valid and relable experimental

designs and sophisticated data analysis techniques or else lose standing in the academic community.

2. Bonus Demografi

Berbicara bonus demografi, kita tidak lekang dari pengertian tentang “ledakan”. Bonus demografi sejatinya merupakan sebuah fenomena yang teramat sangat langka dan tidak akan pernah untuk yang kedua kalinya. Hanya Sebagian dari sejumlah negara-negara di dunia yang mengalami bonus demografi, salah satunya adalah Jepang, Jerman, China, Rusia, dan India. Bonus demografi sendiri tentunya memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap seluruh kegiatan sosial-ekonomi serta budaya suatu negara. Banyak hal yang sifatnya kompleks dapat dipengaruhi oleh kondisi negara yang mengalami suatu bonus demografi oleh karena bonus demografi itu sendiri dapat dikatakan sebagai ledakan jumlah anak muda yang disebut sebagai sumber inovasi, penemu suatu budaya, dan pencipta tren. Tentu semua hal itu juga bersinggungan dengan sesuatu yang sifatnya abstrak di dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam hal ini, budaya, kebiasaan, tingkah laku.

“The demographic devident refers to the accelerated economic growth that begins with changes in the age structure of a country population

as its transition from high to low birth and death rates” (Gibble and Bremner 2012:2).

Berarti bonus demografi cenderung mengarah kepada adanya sebuah akselerasi ekonomi oleh akibat dari perubahan struktur umur di sebuah negara yang dimana perubahan struktur umur ini disebabkan oleh keadaan sebuah wilayah yang angka usia produktifnya jauh lebih tinggi di satu sisi angka kelahiran yang rendah serta angka kematian yang tinggi (angka kematian yang dimaksudkan mengarah kepada angka usia tua yang telah memasuki fase ‘layu’).

Melihat pemahaman ini, dapat disimpulkan bonus demografi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap suatu tatanan sosial yang lebih luas ditengah suatu negara. Akselerasi ini mengakibatkan perubahan struktur yang signifikan akibat adanya mobilitas angka pertumbuhan jumlah manusia yang rentan umurnya 17-64 tahun .

3. Pengangguran

Pengangguran merupakan margin dari suatu masyarakat yang dimana kondisinya mereka saat ini tidak dalam sedang aktivitas bekerja, berada dalam suatu pekerjaan, ataupun mereka yang sedang

berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran sendiri tercipta berdasarkan jumlah angkatan kerja yang banyak dengan kondisi lapangan pekerjaan yang tidak dapat menyeimbangi jumlah pihak yang mencari pekerjaan pada suatu masa dan ruang tertentu. Fenomena ini tentunya menyebabkan gesekan atau singgungan antara satu pekerja dengan pekerja yang lain dalam memperebutkan kursi pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS seri Statistik Pengangguran) menjelaskan bahwa setengah dari pengangguran itu disebabkan oleh realitas lapangan atau kondisi lapangan dari para pekerja tersebut. Hal ini dilihat dari pengalaman dan keterampilan bekerja seseorang, bagaimana individu mematuhi nilai dan norma, serta pengalaman bekerja dari seseorang. Pemahaman tentang pengangguran atau *unemployment person* yang dikutip dari buku karangan Pinto, J.E Piros, C.D (2013) yg berjudul “*Economics for Investment and Decision Makers (Micro, Macro, and International Economics)*” menjelaskan: “*Unemployed are the people that actively seeking an employment but are currently without a job. Some that special subcategories include:*

- a. *Long term unemployed that the people who have been out of work for a long time or more than three to four months in may countries but are still looking for a job.*

b. *Frictionally unemployed are the people that not working at the time of filling out the statictical survey because they just left one job and are about to start another job. That is the frictioally unemployed have a job waiting for them and are not one hundred percent unemployed. It's just that they have not started the new job yet.*

D. Angkatan Kerja

Pernyataan teoritis oleh Prof. Soemitro secara definitif, angkatan kerja adalah bagian dari jumlah suatu penduduk yang memiliki pekerjaan ataupun yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan suatu pekerjaan yang produktif. Prof. Soemitro Djojohadikusumo menjelaskan tentang faktor-faktor angkatan kerja. Adapun faktor-faktor tersebut di antaranya:

a. Jumlah dan sebaran usia penduduk

Penduduk yang usianya lebih dari batas tertentu dianggap termasuk ke dalam usia bekerja. Oleh sebab itulah mengapa mereka disebut bagian dari angkatan kerja.

b. Pengaruh Keaktifan bersekolah terhadap penduduk usia muda

Penduduk usia yang masih muda yang masih bersekolah tidak dianggap sebagai angkatan bekerja walaupun secara umur mereka sudah tergolong sebagai orang yang dapat memulai pekerjaan.

c. Peranan Kaum Wanita dalam Perekonomian

Seorang wanita yang bekerja sebagai IRT atau tidak memiliki pekerjaan di luar rumah tidak dianggap sebagai angkatan kerja. Namun jika wanita tersebut memiliki pekerjaan di luar rumah secara otomatis tergolong sebagai angkatan kerja.

d. Pertambahan Penduduk yang Tinggi

Setiap pertambahan jumlah penduduk secara bersamaan akan mempengaruhi jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja.

e. Meningkatnya Jaminan Kesehatan

Dengan peningkatan jaminan kesehatan, secara teknis umur rata-rata penduduk menjadi bertambah. Umur rata-rata yang terjamin tentu dianggap dapat memperpanjang produktivitas dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga secara otomatis dianggap dapat menambah jumlah angkatan kerja.

E. Stres Sosial

Stress social dapat dijabarkan ke dalam beberapa partisi penjelasan. Hal ini dikarenakan stress social terdiri dari dua kawasan pengertian yaitu stress dan sosial. Stress menurut Hans Selye dalam karya tulisnya yang berjudul “*Stress in Healthy and Disease (1976)*” menyatakan bahwa:

- a. *In behavioral science, stress is regarded as the “perception of threat, with resulting anxiety discomfort, emotional tension and difficultu in adjustment*
- b. *In the group of situation, lack of structure or loss of anchor “makes it difficult or impossible for the group to cope with the requirements of the situation and problem of leadership and interpersonal behaviour becomes one of evolving or supplying a structure or anchor and of the exprertness for coping with the demand of situation*

Statement ini memberi keterangan bahwa tekanan atau stres memiliki beberapa simpul yang menjadi faktor penentu agar stress dapat secara solid dikatakan sebagai sebuah fenomena. Hal ini di antaranya:

- a. Stres merupakan sebuah situasi yang dimana alam sadar manusia berada pada nuansa ancaman atau dalam kata lain stress adalah manifestasi utama saat manusia merasa berada pada suatu ancaman. Oleh karenanya manusia menjadi cemas, merasa gagal, mengalami tekanan, tidaknyaman, ketakutan, dan cenderung memberontak terhadap sesuatu yang menekan kondisi kejiwaannya.
- b. Jika di dalam sebuah kelompok, struktur yang di dalamnya terdapat berbagai aturan, tata, dan pranata yang dimana ini merupakan sebuah pancangan ataupun jangkar dalam tegaknya sebuah struktur dalam masyarakat tidak berdiri kokoh, maka sulit bagi kelompok tersebut untuk dapat bertahan ataupun memenuhi berbagai hal yang secara tipologi dianggap sebagai syarat situasi yang kelompok tersebut harus lewati. Singkatnya, jika masyarakat secara structural tidak secara kohesif menjalankan sebuah proses sosial, maka akan muncul sebuah “*lag of knowledge*” satu dengan yang lain. Hal ini tentunya membuat kita kesulitan dalam memenuhi persyaratan utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial.

Tentu hal ini dapat disimpulkan sebagai cikal bakal munculnya suatu kondisi kesenjangan dan ketegangan di dalam persaingan yang sangat-sangat berpotensi mempengaruhi struktur di dalam sosial masyarakat. Dalam kondisi tertentu, stres sosial ini merupakan alasan adanya potensi kekacauan sosial ditengah-tengah munculnya suatu ketegangan yang sifatnya dapat menghancurkan keteraturan. Ketegangan muncul oleh karena perbedaan *knowledge* yang dialami para pesaing pencari pekerjaan.

F. Perilaku Menyimpang

Dalam hal yang lanjut, perilaku menyimpang sejatinya memiliki implikasi. Salah satu implikasi dari perilaku tersebut adalah ancaman dan peningkatan rasa takut ditengah masyarakat. Dorongan seseorang dalam memutuskan untuk berlaku menyimpang tentu disebabkan oleh beberapa faktor. Perilaku menyimpang yang dijabarkan oleh Frederick Howard Wines dalam buku terkenalnya yang berjudul *Punishment and Reformation* menjabarkan perilaku menyimpang ke dalam dua kategori, di antaranya:

a. Faktor subjektif

Merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang (merupakan sebuah sifat pembawaan yang sejak lama ada di dalam diri seseorang).

b. Faktor Objektif

Merupakan faktor yang sumbernya berasal dari luar seseorang atau individu. Hal ini dapat diartikan sebagai faktor yang datang dari lingkungan seseorang.

Dalam penjabaran yang dipandang dari sudut pandang sifat suatu penyimpangan, terdapat 2 jenis penyimpangan, di antaranya:

1. Penyimpangan Positif

Penyimpangan positif dianggap sebagai suatu penyimpangan yang berpotensi memberikan implikasi baik terhadap lingkungan dan penyimpangan ini tentunya dapat diterima sebagai pembelajaran yang baik bagi khalayak masyarakat.

2. Penyimpangan negatif merupakan penyimpangan yang berpotensi memberikan implikasi buruk terhadap lingkungan masyarakat. Tentunya penyimpangan ini sudah melanggar pranata sosial. Di dalam penjabaran lanjut, penyimpangan negatif terbagi atas 2 sub poin, di

antaranya:

a. Penyimpangan Primer

Merupakan suatu penyimpangan yang dilakukan dengan temporer dan cenderung tidak berulang-ulang.

b. Penyimpangan Sekunder

Suatu penyimpangan yang jelas terlihat dan sering terjadi bahkan berimplikasi buruk yang sudah pasti mengganggu orang-orang.

G. Kejahatan Harta Benda

Definisi yang dirangkum di dalam KUHP terkait kejahatan harta benda dapat kita lihat di KUHP pasal 362-367 dengan isi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda Sembilan ratus ribu rupiah....”. Kejahatan harta benda sendiri merupakan suatu tindakan melawan hukum sebagai pranata sosial yang dimana individu sebagai pelaku kejahatan merampas, mengambil, menghilangkan, mencuri suatu yang bukan hak miliknya dengan cara mengambil kepunyaan orang lain secara kekerasan.

Di dalam buku *Criminology a Sociological Introduction* karya Eamon Carrabine, Pam Cox, Maggy Lee, Keen Plummer, dan Nigel South menjelaskan bahwa: “*Broadly Speaking, property crime involves stealing and dishonestly obtaining or damaging another’s property. Wheter tangible goods or intangible property.*”.

Artinya, secara garis besar, kejahatan harta benda melibatkan pencurian dan dengan cara yang benar, atau tidak jujur memperoleh, ataupun merusak property pihak lain, baik itu barang berwujud maupun barang tidak berwujud (kekayaan intelektual).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam konteks penelitian yang hendak diteliti ini, peneliti memerlukan penjabaran yang luas, dan kompleks, presisi dan saling mendukung. Dalam mengonstruksi penelitian ini, peneliti memerlukan sebanyak mungkin informasi yang bersifat deskriptif sehingga pembaca dapat dengan jelas secara runut dan lengkap, memahami konteks dari penelitian yang hendak diteliti. Maka dari itu, peneliti memilih metode kualitatif sebagai metode penelitian yang memiliki karakteristik yang sesuai bagi peneliti untuk menggambarkan secara luas tentang fenomena yang diangkat. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian sosial. Penelitian yang bersifat *social science* memiliki kecenderungan konten yang bersifat deskriptif dan memerlukan banyak sekali informasi dari studi kepustakaan. Hal ini dilengkapi dengan penjabaran dari Prof. Dr. Ir. Marsudi dan Iwan Sofana, S.Si, M.T terkait penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dijelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*), dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. (Menulis Karya Ilmiah:68).

Dalam penelitian kualitatif, peneliti memanfaatkan manusia sebagai instrumen utama dari penelitian ini. Peneliti digunakan sebagai alat mutlak dalam

mengumpulkan berbagai jenis informasi. Peneliti adalah mutlak hadir sebagai instrumen di dalam proses penelitian sehingga secara umum penelitian Kualitatif mengharuskan peneliti turun dan bersentuhan langsung ke lapangan. Tentu dalam hal ini, peneliti yang dimanfaatkan sebagai instrumen harus dibekali dengan berbagai jenis pengetahuan, kemampuan serta keahlian khusus yang dimanfaatkan instrumen atau yang disebut sebagai sub instrumen dalam melancarkan penelitian yang ada.

Di samping itu, pendekatan studi kepustakaan juga menjadi cara-cara peneliti dalam menyempurnakan dan memberikan berbagai macam bentuk legitimasi bagi penelitian ini. Peneliti juga melaksanakan wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi baik *photo*, *video*, ataupun *voice note* sehingga semua informasi ini dimanfaatkan sebagai dasar utama dan pijakan bagi peneliti dalam menjalankan proses penelitian hingga akhir.

B. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih tipe penelitian *Explanatory* atau *Confirmatory Research*. Dalam penelitian ini, peneliti memilih tipe *explanatory* karena peneliti mengharuskan menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain ataupun bagaimana sebuah variabel mempengaruhi variabel yang lainnya (Umar 1999:36). Dalam kajian "*Peningkatan Kejahatan Harta Benda di Fase Menu Bonus Demografi Riau 2030*", peneliti mengharuskan diri menggabungkan berbagai macam variabel dalam menyimpulkan sebuah fenomena dan secara runtut

membuktikan kemunculan kejahatan harta benda berdasarkan variabel-variabel yang diangkat. Suatu variabel memiliki muatan informasi dan jabaran yang berdampak langsung kepada suatu variabel yang lain. Dalam aspek penelitian ini, bonus demografi memiliki beberapa penjabaran fakta terkait persiapan-persiapan, kondisi demografis, serta kebijakan tertentu yang dimana hal ini informasi ini akan menjadi landasan pertama bagi peneliti untuk menganalisis apakah hal tersebut berpotensi menimbulkan *anomie*, yang berujung pada fenomena ketiga yaitu kemunculan kejahatan harta benda sebagai dampak dari *anomie* tersebut.

Dalam hal ini, kausalitas suatu variabel terhadap variabel yang lain sangat dibutuhkan sehingga kita dapat melihat dengan lugas informasi yang harus ditekankan dalam skripsi. Setiap variabel pastinya dapat diperoleh di lapangan dan studi kepustakaan. Fakta terkait variabel yang diangkat merupakan objektif utama bagi peneliti untuk dikumpulkan. Di samping itu, peneliti akan melaksanakan pengumpulan fakta data lapangan dengan cara terjun langsung kelapangan dengan teknis wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung dari dampak fenomena permasalahan yang hendak dibahas. Tentunya dalam hal ini semua bagian dari informasi harus dipresentasikan dalam konteks keabsahan yang solid oleh karena syarat variabel dalam kasus ini perlu dibuktikan secara konkret. Maka keabsahan ini akan menjadi legitimasi juga bagi peneliti saat akhir dari penelitian ini menghasilkan sebuah *output* yang *fresh* untuk dijadikan literatur, bahan pembanding, sumber informasi, dan keperluan-keperluan terkait lainnya. Pemilihan tipe *explanatory* dipandang sebagai tipe yang

paling sesuai dengan tema yang diangkat dan dianggap penting oleh karena penelitian ini harus tetap menjaga kredibilitasnya.

Mengangkat berbagai kasus penelitian, banyak di antara kita penelitian sejatinya tidak berdiri pada satu koridor yang jelas dan sesuai sehingga *output* yang dihasilkan cenderung tidak maksimal. Sehingga dengan demikian pembaca tidak dapat memperoleh esensi yang dipandang sebagai tujuan utama dari pembaca memutuskan untuk berkontribusi dalam menelaah penelitian yang kita hasilkan.

C. Lokasi Penelitian

Pada kesempatan penelitian ini, peneliti menetapkan ruang lingkup provinsi Riau sebagai kawasan penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan bergerak ke 2 kota yaitu Pekanbaru dan Dumai sebagai bagian lokasi penelitian dan sumber *sample*. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah Pekanbaru dan Dumai merupakan kota dengan kapasitas SDM dan lapangan pekerjaan yang cukup memadai. Di samping itu peradaban dan *mobilities* masyarakat di kota-kota tersebut dipandang cukup tinggi sehingga kita dapat lebih mudah menemukan *key informan* yang diperlukan di dalam penelitian ini, secara abstrak, peneliti mengidentifikasi posisi *key informan* yang terletak pada kawasan marginal di kota-kota berkembang yang pastinya dianggap sebagai “residu” masyarakat akibat gagal bersaing dipangung dunia pekerjaan. Untuk waktu penelitian di kedua kota yaitu Pekanbaru dan Dumai, sekitar 2 bulan terhitung dari bulan September sampai November.

D. Pemilihan Sumber Informan

Dalam hal ini, tentu kita sama-sama memahami bahwa informan merupakan menjadi salah satu elemen yang paling utama di dalam sebuah penelitian. Informan mengandung berbagai macam informasi yang kita butuhkan di samping mereka memberikan legitimasi-legitimasi dalam hipotesis yang kita angkat dalam sebuah penelitian. Informan dalam eksistensinya juga dianggap sebagai orang yang telah lama berada pada suatu fenomena dan diyakini telah mampu menjabarkan secara terperinci bagaimana sebuah situasi ia alami, dampak, pola, dan informasi-informasi penting lainnya. Menurut Moloeng (2014) informan dari sebuah penelitian dapat diurai menjadi 2, di antaranya:

a. *Key Informan*

Merupakan pihak-pihak yang secara utuh mengetahui informasi pokok yang diperlukan peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.

b. *Informan*

Merupakan pihak-pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam sebuah fenomena, namun secara garis besar dapat memberikan penjelasan terkait fenomena yang diteliti.

Dalam hal ini, adapun *key informan* dan *informan* yang peneliti pilih untuk menyempurnakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak Polda Riau yang memberikan keterangan terkait data statistik kejahatan harta benda serta jumlah kejahatan dari tahun 2018-2020. Pihak Polda akan memberikan keterangan lengkap terkait alasan dan latar belakang terjadinya kejahatan harta benda di Provinsi Riau.
2. Badan Pusat Statistik akan menjadi *key informan* dan akan memberikan paparan terkait kondisi sektor industri hingga UMKM. Bagaimana tingkat penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau, dan pandangannya terkait bonus demografi.
3. BPS akan menjadi informan yang memberikan berapa jumlah angka usia produktif di Provinsi Riau dari tahun 2018 sampai 2020

Tabel 3. Jumlah Key Informan dan Informasi Penelitian

NO	KETERANGAN	<i>Key Informan</i>	<i>Informan</i>
1	Polda Riau (Direskrimum)	1	-
2	Dinas Penanaman Modal Provinsi Riau	1	-
3	Badan Pusat Statistik Provinsi Riau	-	1
Jumlah		2	1

(Sumber: Modifikasi Penulis 2021)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang dilaksanakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data ataupun informasi yang berkaitan dengan penelitian. Pada kesempatan penelitian kali ini, peneliti memanfaatkan teknik pengumpulan data yang dinyatakan oleh data yang dikumpulkan sejatinya harus lengkap dan presisi. Semua dituliskan berdasarkan tanggal waktu dan keterangan yang jelas oleh pengumpul data. Tidak hanya sampai disitu, data juga perlu terukur. Adapun aturan teknis pengumpulan informasi atau data yang dilaksanakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Merupakan teknis yang peneliti melakukan pengamatan langsung ke area lapangan atau lokasi sampel. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang valid dan kredibel yaitu informasi-informasi langsung yang diperoleh melalui wadah penelitian

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab. Proses sudah pasti dilengkapi alat pembantu seperti alat perekam suara, buku dan alat tulis. Dalam teknis wawancara peneliti mengaplikasikan kuesioner dan melakukan tanya-jawab yang intens untuk memperoleh berbagai macam informasi secara luas, gamblang, presisi, dan absolut.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik ini dimanfaatkan sebagai penyempurnaan bukti pengumpulan data yang dimana dalam hal ini, peneliti memanfaatkan kamera sebagai alat dokumentasi secara visual. *Output* dari dokumentasi akan menghasilkan data foto dan video. Di samping itu, teknik dokumentasi dimanfaatkan sebagai sumber perolehan data penting yang dipandang sebagai salah satu pemberi legitimasi sebuah data yang perlu dijabarkan dengan teknik dokumentasi.

F. Analisa Data

Analisa data merupakan salah satu prosedur yang paling kritis yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Analisa data pada dasarnya dilaksanakan supaya informasi yang dibutuhkan sesuai dan presisi dengan kebutuhan penelitian. Analisa data dapat dilakukan secara manual maupun komputer dengan berbagai jenis program statistik yang telah diakui baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional. Intinya, masalah reliabilitas dan validitas dari sebuah pengukuran atau pun kesahihan merupakan 2 hal pokok dalam penelitian yang tidak boleh ditinggalkan (Prof. Dr. Ir. Marsudi W. Kisworo, 2017). Maka dalam hal ini, analisa data adalah proses melihat dan mempertimbangkan, memilah dan menentukan berbagai jenis data yang harus disajikan dan dimanfaatkan dalam penelitian yang akan datang.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Provinsi Riau

Provinsi Riau dibentuk pada tahun 1957 dengan Tanjung Pinang sebagai Ibu Kota sementara. Di kemudian hari Ibu Kota Riau di pindahkan ke Pekanbaru dan tokoh yang menduduki jabatan Gubernur Riau pertama adalah S.M. Amin. Dalam proses pembentukannya para pendiri mendalilkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1948, tentang pembagian Sumatera dalam tiga provinsi, antara lain Sumatera Tengah yang meliputi keresidenan Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Saat ini, Riau merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi dengan sumber daya alam, terutama minyak bumi, gas alam, kelapa sawit, karet dan perkebunan serat. Riau pernah menjadi penghasil tambang bumi dan mineral lainnya dengan pulau Bintan yang sempat dijuluki sebagai pulau “segenteng lada” oleh karena banyak menghasilkan lada. Di samping itu daerah Pulau Tujuh terutama pulau Midai pernah menjadi Kopra terbesar di Asia Tenggara, diperkirakan sejak tahun 1906-1950 silam. Di wilayah lain, Bagan Siapi-api sampai tahun 1950an tercatat sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia, dan ditambah batu bata yang dibuat oleh perusahaan Raja Aji Kelana di Pulau Batam pasarannya mencapai Malaysia hingga sekarang ini. Kemudian dalam bidang penghasil karet alam, dengan sistem kupon tahun 1930an belahan daratan seperti Kuantan, Indragiri dan Kampar juga daerah yang amat potensial

Dapat kita simpulkan, sejumlah besar wilayah Riau merupakan wilayah yang memiliki potensi alam yang berlimpah. Tak jarang kita mendengar bahwa wilayah yang memiliki kekayaan alam berlimpah juga memberikan pengaruh baik kepada penghasilan masyarakat yang tinggal disekitarnya. Hingga saat ini pun, masyarakat yang tinggal di luar Jawa memahami dan mengetahui bahwa orang-orang yang berasal dari luar Sumatera menganggap orang-orang Riau merupakan orang-orang kaya yang memiliki pendapatan diatas rata-rata oleh karena kondisi geografisnya. Namun kenyataannya tidak demikian. Kita masih melihat berbagai polemik dan sengketa antar instansi terkait dan masyarakat terkait pembagian hasil bumi dan lahan, kurangnya bentuk imparatasi positif dan pertambangan yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya dilakukan atau dalam kata lain metode yang tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Sejarah Riau terkait erat dengan Kerajaan Sriwijaya. Sejumlah ahli sejarah berpendapat bahwa kerajaan ini berpusat di Palembang karena disana ditemukan prasasti peninggalan Sriwijaya. Beberapa ahli sejarah lain mengatakan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya adalah di Muaratakus Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dan masa Kerajaan Sriwijaya adalah antara abad ke 11 sampai abad ke 12. Ketika itu kekuasaan Kerajaan Sriwijaya meliputi seluruh wilayah Indonesia bagian barat dan seluruh Semenanjung Melayu. Pasca keruntuhan Kerajaan Sriwijaya, di Riau muncul beberapa kerajaan, dan salah satu kerajaan besar adalah Kerajaan Malaka yang didirikan oleh Prameswara pada awal abad ke-14. Kerajaan Malaka mencapai puncak kejayaannya pada era pemerintahan Sultan Muhammad Iskandar Syah pada awal abad ke 15.

Kejayaan Malaka ini tidak lepas dari peran panglima angkatan lautnya, yaitu Laksamana Hang Tuah.

Pada awalnya Provinsi Riau tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah yang terdiri dari tiga bagian yaitu Jambi, Riau dan Sumbar dimana pusat pemerintahan berada di residen Sumatera Barat. Alasan pemisahan dari residen Riau dari Provinsi Sumatera Tengah karena:

- a. Pusat pemerintahan yang berada di residen Sumatera Barat sehingga Riau memang tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah Provinsi.
- b. Adanya perbedaan karakteristik daerah sehingga pemahaman visi dari masing-masing residen tidak dapat disatukan.
- c. Adanya kesan bahwa pihak pemegang kekuasaan di Sumatera Tengah selalu memaksakan diri setiap kebijakan yang diambilnya.

Provinsi Riau yang dulunya terdiri dari 16 Kabupaten/Kota sekarang hanya tinggal 12 Kabupaten/Kota setelah Provinsi Kepulauan Riau terhitung 1 Juli 2004 resmi menjadi Provinsi ke 32 di Indonesia. Adapun lokasi spesifik dari Provinsi Riau yaitu Bukit Barisan sampai ke Laut Cina Selatan, terletak antara $1^{\circ}15'$ Lintang Selatan sampai $4^{\circ}45'$ Lintang Utara atau antara $100^{\circ}03'$ - $109^{\circ}19'$ Bujur Timur *Greenwich* dan $6^{\circ}50'$ - $1^{\circ}45'$ Bujur Barat Jakarta. Provinsi Riau sebelum dimekarkan menjadi dua Provinsi mempunyai luas 235.306 Km² atau 71,33 persen merupakan daerah lautan dan hanya 94.561,61 Km² atau 28,67 persen daerah daratan. Di daerah daratan terdapat 15 sungai di antaranya ada 4 sungai yang mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 km), Sungai Rokan (400 km), Sungai Kampar

(400 km) dan Sungai Indragiri (500 km), keempat sungai yang membelah dari pegunungan daratan tinggi bukit Barisan bermuara di selat Malaka dan Laut Cina Selatan.

B. Sejarah Pimpinan Provinsi Riau

Seiring berjalannya waktu, berikut ini daftar nama Gubernur Riau beserta masa jabatannya :

1. Mr. Mohammad Amin (5 Maret 1958-6 Januari 1960)

Pejabat sekaligus Gubernur Riau pertama. Saat masa menjabat, Riau sedang dalam masa kegalauan, yakni terjadinya pemberontakan PRRI/Permesta. Saat itu, PRRI telah membentuk provinsi Riau di bawah pemerintahan PRRI. Namun perjuangan rakyat Riau dengan dasar Kongres Rakyat Riau I tahun 1956 yang dengan gigih diperjuangkan oleh Ma'rifat Marjani, putra Kuansing, wakil Perti yang merupakan satu-satunya anggota Konstituante dari Riau. Pada waktu itu, Dewan Banteng membentuk Gubernur Muda Riau dengan Gubernur Muda Syamsu Nurdin.

2. Kaharuddin Nasution (1960-1966)

Berangkat dari Tanjung Pinang, Kaharuddin Nasution yang waktu itu adalah perwira RPKAD berhasil membersihkan Riau Daratan dari pengaruh PRRI. Pengaktifan ibukota Riau sesuai amanat UU Darurat tentang pemekaran provinsi Sumatera Tengah menjadi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi dapat

terlaksana. Masa jabatan Kaharuddin Nasution di Pekanbaru berada dalam suasana yang dipenuhi dengan kekuatan Orde Lama. Setelah tumbanganya Orde Lama, Kaharuddin Nasution pun dianggap antek-antek Orde Lama lengser dan akhirnya menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara.

3. Brigjen Arifin Ahmad (1966-1978)

Berakhirnya Orde Lama dan dimulainya Orde Baru merupakan kesempatan emas bagi Arifin Ahmad, satu-satunya Gubernur Riau putra daerah asli Riau pada masa Orde Baru. Arifin Ahmad adalah perwira karier TNI yang mengawali karirnya sebagai tentara pejuang di Riau. Arifin Ahmad dianggap sebagai sosok yang berhasil menata kembali Riau dari puing-puing Orde Lama dan dianggap sebagai salah satu gubernur yang berhasil di Riau.

4. Brigjen R Subrantas Siswanto (1978-1980)

R Subrantas adalah perwira karier TNI yang mengawali sebagai prajurit TNI di Riau bersama-sama Arifin Ahmad dan Imam Munandar.

5. Mayjen H Imam Munandar (2 Oktober 1980-6 Agustus 1988)

Rekan seperjuangan Arifin Ahmad dan R Subrantas ini berhasil menjadi Gubernur dua priode. Namun, Imam Munandar diwarnai insiden, yakni pada pemilihan keduanya, dimenangkan oleh Ismail Suko, mertua Rusli Zainal dan akhirnya kemenangan itu akhirnya dianulir.

6. Letjen Soeripto (28 Desember 1988-28 Desember 1998)

Soeripto adalah TNI Bukit Barisan yang berhasil menjadi Gubernur Riau dua periode setelah berakhirnya masa jabatan Imam Munandar. Menjelang akhir-akhir masa jabatannya, Soeripto mengalami masa-masa reformasi, yang kemudian disusul demo menuntut mundur Soeripto sebagai Gubernur.

7. Brigjen H. Saleh Jasit. SH (28 Desember 1998-21 November 2003)

Saleh Jasit merupakan perwira TNI yang menjadi Bupati Kampar pada menjelang Orde Baru. Nuansa putra daerah pada masa pasca-reformasi merupakan peluang bagi Saleh Jasit. Saleh Jasit kemudian dianggap sebagai Gubernur yang berjasa dalam pengangkatan PSPS Pekanbaru menjadi klub utama Indonesia, bahkan pernah menjadi klub dengan pemain dan pelatih termahal di Indonesia. Pada pemilihan gubernur berikutnya Saleh Jasit harus menyerah pada Rusli Zainal, generasi muda yang bergeriliya dari partai non-Golkar. Setelah akhir jabatannya, Saleh Jasit mengalami kepahitan mendekam dalam penjara akibat kasus pemadam kebakaran.

8. HM. Rusli Zainal. SE. MP (21 November 2003-31 Juli 2008)

Rusli Zainal dengan slogan K21-nya, dianggap berhasil mengoptimalkan potensi Riau dan memberdayakan masyarakat, di antaranya berbagai proyek multiyears pengentasan keterisoliran, program UED-SP.

9. Drs. H. Wan Abu Bakar (31 Juli 2008-21 November 2008)

Wan Abu Bakar adalah Gubernur Riau yang menjabat karena aturan Pilkada pada saat itu, yakni Gubernur (Rusli Zainal) harus mengundurkan diri jika mengikuti Pilkada.

10. HM. Rusli Zainal. SE. MP (21 November 2008-12 November 2013)

Periode kedua dari gubernur Rusli Zainal tidak terselesaikan karena kasus korupsi.

11. Drs. Annas Maamun (19 Februari 2014-25 September 2014)

Annas Maamun sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Rokan Hilir 2 periode 2006-2011 dan 2012-2014. Setelah itu, Annas Maamun menjabat sebagai Gubernur Riau, namun tugasnya tidak terselesaikan karena kasus korupsi.

12. Arsyadjuliandi Rachman. M.B.A (25 Mei 2016-20 September 2018)

Arsyadjuliandi Rachman atau biasa dipanggil Andi Rachman sebelumnya pernah menjabat sebagai wakil Gubernur Riau sejak 19 Februari 2014 hingga 26 September 2014 dan anggota DPR-RI Fraksi Golkar sejak 2009 hingga 2014, dan selanjutnya Arsyadjuliandi Rachman menjabat sebagai Gubernur Riau.

13. Drs. Wan Tambrin Hasyim (10 Desember 2018-19 Febuari 2019)

Wan Tambrin Hasyim merupakan politisi yang berasal dari Riau. Wan Tambrin Hasyim juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Riau, dan sempat bertugas sebagai Pelaksana Tugas Gubernur mengingat adanya pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Sebelum menjadi wakil Gubernur, Wan Tambrin Hasyim juga pernah menjabat sebagai Bupati Rokan Hilir antara 7 Juni 2001 dan 7 Juni 2006.

14. Drs. Syamsuar. M. Si (20 Febuari 2019-sekarang)

Syamsuar sebelumnya menjabat sebagai Bupati Siak selama 2 periode yakni 2011-2016 dan 2016-2019 setelah menjabat sebagai Wakil Bupati Siak periode 2001-2006.

C. Keunggulan Provinsi Riau dalam Bidang Ekspor-Import

Berdasarkan Buku Bertia Resmi Statistik No. 57/11/14/Th. XXII, 15 November 2021, Badan Pusat Statistik Provinsi Riau menjelaskan sektor ekspor-impor Riau mengutamakan sektor migas hingga Riau dijuluki sebagai primadona sektor migas di Indonesia, Adapun spesifikasi migas tersebut mencakup:

1. Industri Pengolahan Hasil Minyak
2. Pengadaan Gas
3. Pertambangan

4. Minyak Mentah
5. Gas alam hasil olahan

Di samping itu, BPS Provinsi Riau juga menjelaskan sektor non migas juga menjadi keunggulan barang ekspor-impor yang selalu dijajalkan oleh provinsi Riau, Adapun hal tersebut di antaranya:

1. Lemak & Minyak Hewan Nabati
2. Berbagai Produk Kimia
3. Bubur Kayu (Pulp)
4. Kertas dan Karton
5. Bahan Kimia Organik
6. Ampas dan Sisa Industri Makanan
7. Serat Sapel Buatan
8. Berbagai Makanan Olahan
9. Bahan-bahaan Nabati
10. Tembakau

Hasil olahan bumi dari Provinsi Riau juga telah menjelajahi pasar Nasional dan Internatioan dengan keuntungan sebesar US\$16,29 Miliar atau dapat dikatakan mengalami kenaikan sebear 49,77 persen dibandingkan ekspor-impor periode 2020 dan nilai Impor pada tahun 2021 sebesar US\$ 1,21 Miliar dolar atau dalam hal ini, sektor impor mengalami kenaikan persentase pada angka 11,38

persen. Kenaikan impor ini justru terjadi mengingat pada tahun ini pandemic covid-19 masih terjadi dan memberikan dampak kepada banyak orang. Ini tentu menjadi masuk akal jika kita melihat angka 11,38 persen pada moment-moment seperti ini.

D. Jumlah Masyarakat Provinsi Riau

Jumlah Masyarakat Provinsi Riau Penduduk di Provinsi Riau sangat majemuk, ini aset bagi Riau, dan agama yang dianut oleh penduduk Riau sangat beragam, karena kebebasan beragama dan berkeyakinan di Riau berjalan dengan baik. Yaitu agama Islam sebanyak 4.907.218 jiwa, Kristen Protestan sebanyak 313.660 jiwa, Kristen Katolik sebanyak 125.561 jiwa, Hindu sebanyak 21.837 jiwa, Budha sebanyak 150.759 jiwa, Konghucu sebanyak 725 jiwa, Aliran kepercayaan lainnya sebanyak 434 jiwa

E. Klasifikasi Masyarakat Berdasarkan Usia di Provinsi Riau

Adapun klasifikasi masyarakat berdasarkan usia pada provinsi Riau dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4. Klasifikasi Masyarakat Berdasarkan Usia di Provinsi Riau

Kelompok Umur	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Provinsi Riau (Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
0-4	374.071	376.965	379.485	359.420	362.106	364.435	733.491	739.071	743.920
5-9	348.549	355.559	362.421	331.813	340.109	348.149	680.362	695.668	710.570
10-14	321.403	325.681	329.718	305.270	308.403	311.455	626.673	634.084	614.173
15-19	299.626	304.878	310.634	285.859	290.995	296.365	585.485	595.873	606.999
20-24	297.516	298.100	299.727	289.761	289.069	289.118	587.277	587.169	588.845
25-29	306.725	311.747	314.863	295.301	301.049	305.401	602/026	612.796	620.264
30-34	285.895	292.150	314.863	278.510	282.676	287.602	564.405	574.826	586.818
35-39	270.882	274.310	278.784	262.141	267.065	271.806	533.023	541.375	550.590
40-44	250.524	215.570	224.934	229.065	238.041	246.196	479.589	495.912	509.457
45-49	206.383	215.570	224.522	184.305	193.123	201.960	390.688	408.693	426.482
50-54	159.363	167.891	176.631	142.187	149.811	157.708	301.550	317.702	334.339
55-59	117.496	124.141	131.126	105.435	111.857	118.431	222.949	235.998	249.557
60-64	79.730	85.642	91.565	70.785	76.819	82.902	150.515	162.461	174.467
65-69	47.107	51.380	55.927	44.201	47.528	51.424	91.308	98.908	107.351
70-74	27.099	28.284	30.414	28.308	29.825	31.531	55.407	58.361	61.945
75+	23.938	25.284	26.648	29.225	30.728	32.320	53.163	56.012	58.968
	3.416.307	3.495.705	3.574.942	3.241.604	3.319.204	3.396.803	6.657.911	6.814.909	6.971.745

(Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau)

F. Kota-Kota di Provinsi Riau

Adapun Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau adalah:

- a. Kota Pekanbaru
- b. Kota Dumai
- c. Kabupaten Kampar
- d. Kabupaten Pelalawan
- e. Kabupaten Indragiri Hulu
- f. Kabupaten Indragiri Hilir
- g. Kabupaten Bengkalis
- h. Kabupaten Siak
- i. Kabupaten Kuantan Singingi
- j. Kabupaten Rokan Hulu
- k. Kabupaten Rokan Hilir
- l. Kabupaten Meranti

G. Kondisi Sosial Ekonomi Provinsi Riau

Indonesia adalah negara kepulauan karena memiliki banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Karena banyaknya pulau yang ada di Indonesia menyebabkan kebudayaan dan kesenian tiap daerah berbeda pula. Riau adalah salah satu provinsi daerah yang berada di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Riau memiliki kebudayaan dan kesenian yang khas dari daerahnya sendiri, kebudayaan yang ada di Riau memiliki ciri khas sebagai Kebudayaan Melayu. Adat

dan Kebudayaan Melayu yang mengatur tingkah laku dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal dan berasal dari daerah ini.

Provinsi Riau berjuduk Bumi Lancang Kuning karena letaknya sangat strategis di negara-negara serumpun, sehingga pemerintah dan rakyatnya berencana bahwa Provinsi Riau akan mengambil peran strategis di bidang perekonomian dan kebudayaan. Kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat karena Provinsi Riau berkeinginan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan Kebudayaan Melayu di bentangan Asia Tenggara.

Keinginan yang merupakan mimpi itu cukuplah berdasar dikarenakan Provinsi Riau berhadapan dengan Selat Melaka yang termasuk selat tersibuk di dunia, selain itu keragaman seni budaya dan adat istiadat Melayu yang terdapat di kabupaten/kota sebagai episentrum kebudayaan, menjadi modal utama untuk menjadikan Riau sebagai pusat Kebudayaan Melayu di bentangan Asia Tenggara. Dinas pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Riau sebagai salah satu institusi penyanggah beban pencapaian yang mulia, dan akan tetap melakukan kegiatan yang bertali berajut dengan seluruh potensi budaya dan pariwisata yang terkandung di Riau kepada seluruh lapisan masyarakat di bentangan Asia Tenggara bahkan kemasyarakat dunia secara umum.

BAB V

HASIL PENELITIAN

A. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilaksanakan agar peneliti dan penerima dapat Bersama-sama memahami konteks secara keseluruhan terkait hal yang akan dibincangkan melalui penelitian. Pendahuluan juga harus dilakukan agar kita dapat memulai segala sesuatu dengan koridor yang tepat dan presisi. Terutama dalam penelitian kali ini, kita dapat sama-sama mengerti bahwa dalam membahas terkait bonus demografi, kita harus mendudukan variabel-variabel terkait agar kita dapat melihat secara utuh konteks utama yang ada dialam tema bonus demografi dalam hal ini adalah kejahatan harta benda yang disinyalir dapat menjadi sebuah variabel utama yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bonus demografi di provinsi Riau. Untuk membahas kondisi kejahatan harta benda ini, peneliti memulai penelitian dengan mempertemukan *statement* dari pihak dinas penanaman modal yang juga memiliki pandangan solid terkait seberapa jauh penyerapan usia produktif dan pihak kepolisian yang memberikan pandangannya terkait sabab-musabab terjadinya kejahatan harta benda hingga hal apa yang mendasari sebuah kejahatan harta benda dapat berlangsung. Hal ini juga ditambahkan oleh pihak terkait lainnya seperti BPS Provinsi Riau yang ikut serta memberi pandangan, tokoh atau pun ahli kejahatan, dan juga ahli ekonomi.

B. Pelaksanaan Penelitian

Peneliti melaksanakan penelitian dengan memanfaatkan informasi dari pihak terkait selama 3 tahun terakhir. Selama beberapa bulan, peneliti mencoba menyadur sekian banyak hasil dari perkembangan kejahatan harta benda, penyerapan tenaga kerja, perkembangan usia produktif, dan mendengarkan secara keseluruhan elaborasi dari setiap kejadian yang ada di tengah-tengah lapangan. Dalam hal ini, peneliti memanfaatkan tiga Lembaga utama yang menjadi juru kunci dari penelitian ini yaitu Polda Riau, Dinas Penanaman Modal Provinsi Riau, dan didukung oleh data-data statistik dan keterangan dari Badan Pusat Statistik provinsi Riau. Di dalam penelitian ini, kita dapat sama-sama melihat bahwa yang menjadi titik tumpu atau dalam kata ilmiah disebut sebagai *key informan* adalah Polda Riau dan Dinas Penanaman Modal Provinsi Riau. Polda Riau akan memberikan keterangan lengkap terkait bagaimana perkembangan dan keberlangsungan kejahatan harta benda di Provinsi Riau, penanganan dan dampak-dampak lain, hingga bagaimana Polda mengelaborasi dampak kejahatan harta benda terhadap keberlangsungan bonus demografi di Provinsi Riau pada tahun-tahun mendatang. Disisi lain, kita juga melihat Dinas Penanaman Modal akan menjadi *key informan* dalam menjelaskan kondisi penyerapan tenaga kerja di dalam sektor usaha atau ekonomi di Provinsi Riau sebagai penegasan.

Dinas Penanaman Modal merupakan dinas yang mengatur seluruh alur permodalan Provinsi Riau yang berputar pada sektor ekonomi, investasi, dan sektor usaha kecil-menengah (UMKM). Dalam penelitian ini, data usia produktif yang

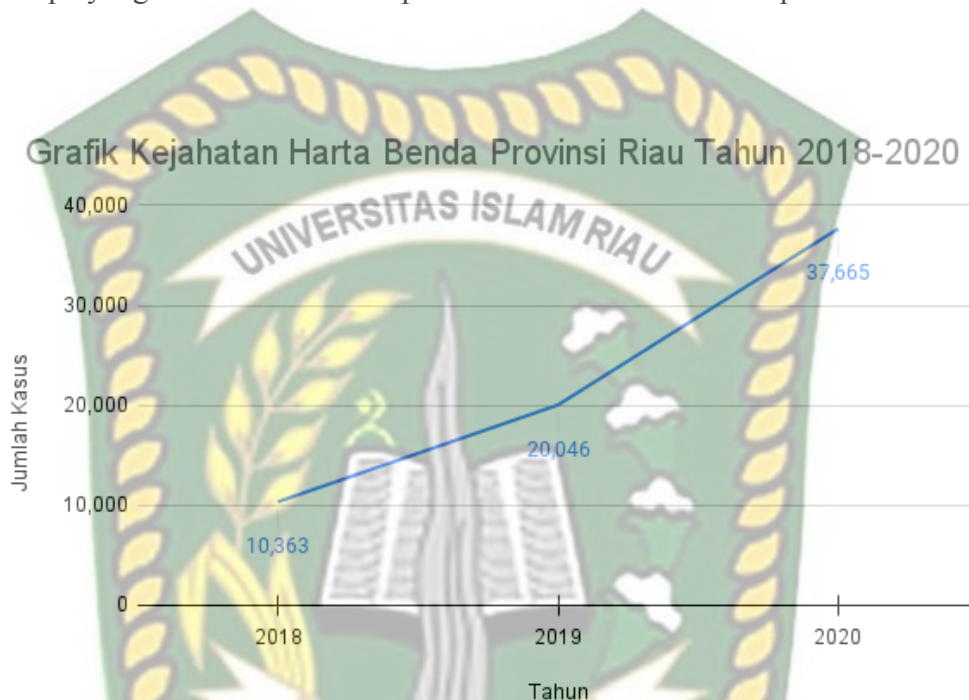
dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Riau akan dijadikan landasan penelitian, yang dimana variabel ini akan memberikan validasi terkait data faktual adanya peningkatan usia produktif 3 tahun terakhir. Selain itu juga kita akan melihat bahwa BPS merupakan variabel acuan yang nantinya akan disandingkan juga dalam paduan penyelarasan data dari Dinas Penanaman Modal Provinsi Riau serta data statistik kejahatan terhadap harta benda Provinsi Riau 3 tahun terakhir. Tujuan penelitian memilih variabel-variabel tersebut adalah untuk mengonkretkan ancaman peningkatan kejahatan harta benda di era menuju bonus demografi yang kita lewati saat ini di Indonesia terutama di Riau. Selain itu, data-data yang dipakai dan penelitian yang dilaksanakan sejatinya membulatkan pandangan penelitian terkait tinjau besarnya potensi peningkatan kejahatan harta benda di fase menuju bonus demografi untuk tahun saat ini dan beberapa tahun lagi menuju puncak Bonus Demografi yang terjadi pada tahun 2028-2030.

C. Elaborasi Variabel Angka Kejahatan Terhadap Harta Benda Provinsi

Riau Tahun 2018-2020

Pada tanggal 25 Januari 2022, Peneliti telah melaksanakan penelitian langsung ke Polda Riau dalam rangkum kegiatan wawancara dan permohonan pengeluaran data statistik kejahatan harta benda di Riau 3 tahun terakhir. Dalam proses penelitian, Peneliti telah disambut baik dan dilayani dengan hangat oleh satuan polisi yang bertugas pada bagian administrasi hingga pada proses wawancara dan permintaan data.

Pada penelitian yang dilaksanakan, sejatinya pihak kepolisian dalam hal ini sangat memahami bagaimana proses penelitian ini berlangsung, apa yang dicari, dan narasi seperti apa yang dibutuhkan oleh si peneliti dalam melaksanakan penelitian kali ini.



Gambar 4. Grafik Kejahatan Harta Benda Provinsi Riau Tahun 2018-2020
(Sumber: Direskrimum Polda Riau)

Dalam penelitian terkait “*Peningkatan Kejahatan Harta Benda di Fase Menuju Bonus Demografi Riau 2030*”, Polda memiliki peranan yang teramat sangat penting yaitu penyajian data statistik yang lebih tepat sasaran dan pemberi jabaran terkait situasi yang dialami. Dalam penjabaran terkait bonus demografi, kita dapat memahami bahwa bonus demografi memiliki elemen yang mendasar yang mempengaruhi proses keberlangsungannya di suatu wilayah atau negara di antaranya:

- A. Kondisi Perekonomian suatu wilayah
- B. Ketersediaan Lapangan Pekerjaan
- C. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat
- D. Kondisi Kebijakan suatu wilayah
- E. Jumlah angka usia produktif suatu wilayah
- F. Infrastruktur dan teknologi masyarakat
- G. Budaya Suatu Wilayah
- H. Keamanan Sosial

Pilar-pilar ini merupakan pilar utama yang menjadikan segala sesuatu terkait keberlangsungan bonus demografi dapat diukur dan dianalisis. Variabel-variabel di atas juga merupakan poin-poin umum yang menjadi dasar suatu perputaran sosial-ekonomi masyarakat. Dalam kaitannya secara langsung, kondisi keberlangsungan peristiwa kejahatan harta benda di Provinsi Riau cukup perlu mendapat perhatian khusus. Pihak polda dalam gambaran umum menjelaskan bahwa setiap tahun Polda Riau selalu mengalami Kejahatan yang berkaitan dengan harta benda. Dan ini merupakan perkara serius yang selalu menjadi masalah di setiap tahunnya. Kita dapat melihat bahwa Polda selalu memberikan pelayanan terbaik yang saat ini kita sudah dapat rasakan manfaatnya baik dalam keperluan administrasi dan keamanan. Namun dewasa ini, Polda tidak dapat memungkiri bahwa banyaknya variabel yang memberikan pengaruh langsung kepada kesejahteraan masyarakat dari satu wilayah ke wilayah yang lain.

Hal ini dinyatakan oleh salah satu sumber yang juga menjadi pihak penting dalam Polda spesifiknya Departemen Kriminal Umum Polda Riau Tahun 2022. Kesejahteraan masyarakat saat ini harus mengalami gesekan antara kecepatan perkembangan teknologi, dan perkembangan budaya masyarakat. di ujung dari cerita, beliau menegaskan bahwa Riau sangat tertinggal dalam urusan gaya hidup sehingga hal-hal yang dianggap sebagai ‘syarat’ agar kita dapat menyesuaikan diri dalam proses sosial sejatinya tidak dapat dipenuhi oleh Masyarakat Riau terutama yang berada pada wilayah pinggiran. Tidak hanya itu, kita masih banyak menemukan pelaku-pelaku kejahatan pada wilayah Ibu Kota provinsi Riau yaitu kota Pekanbaru juga memiliki ciri-ciri yang sama dengan orang-orang yang tertinggal secara *knowledge*. Namun asumsi tersebut hanya didasarkan pada banyaknya masyarakat daerah yang pindah ke Ibu Kota Provinsi dan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap kehidupan di kota besar.

Dalam tabel di atas, kita dapat saksikan dari tahun ke tahun yaitu 2018, 2019, dan tahun 2020 jumlah kenaikan kasus yang mengacu kepada konteks kejahatan harta benda mengalami kenaikan yang cukup tajam. Pasalnya hal ini juga didukung dengan berbagai situasi termasuk salah satunya pada tahun 2020 kita dapat menyaksikan Bersama-sama terjadinya sebuah tragedi terbesar dan terburuk sepanjang sejarah peradaban manusia yaitu pandemi Covid-19 yang menghantam seluruh belahan bumi. Di dalam fase itu juga kita dapat melihat sejumlah pakar ahli dari berbagai belahan dunia sudah mengingatkan bahwa akan terjadi turbulensi besar-besaran pada sektor

perekonomian dunia dan memang faktanya hal itu terjadi dengan dampak yang sangat buruk pada negara kita Indonesia terutama di wilayah Riau. Mengutip dari laman berita *Kompas.com*, beliau mengungkapkan bahwa tahun 2020 adalah tahun dengan pertumbuhan ekonomi terburuk sejak 150 tahun terakhir dan setidaknya terdapat 170 negara di dunia yang mengalami kontraksi akibat Covid-19. Ujar beliau pada lama *Kompas.com*, *“Poin saya adalah ini situasi yang tidak memandang bulu. Dengan adanya kontraksi ekonomi, akan terjadi konsekuensi kenaikan pengangguran, kemiskinan, dan juga dampak kepada kesejahteraan masyarakat,”*. Telah tercatat lebih dari puluhan ribu masyarakat Riau yang mengalami pemutusan kontrak ataupun hubungan kerja akibat sektor industri yang melakukan pengurangan jumlah pekerja agar tetap bisa membagi margin keuangan pada bahan baku dan operasional. Tentunya gambaran ini memunculkan ada suatu stres sosial yang mengakibatkan banyak orang depresi lantaran harus memenuhi kebutuhan namun tidak dapat bertahan. Data tersebut selaras dengan apa yang terjadi di lapangan kemarin.

Data di atas merupakan data valid dan benar adanya sesuai yang dikeluarkan oleh Direskrim Polda Riau yang menanggulangi kasus kejahatan terhadap harta benda pada tahun 2018-2020. Di samping itu juga, dalam fase menuju bonus demografi tahun 2030, kita sudah pasti akan mengalami peningkatan jumlah penduduk yang signifikan, dalam hal ini jumlah penduduk yang memasuki fase usia produktif. Sehingga dalam narasinya, kita dapat melihat pada konteks psikologis masyarakat yang sudah banyak memulai berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara independen. Tentu

situasi ini juga memiliki implikasi yang baru di dalam masyarakat. baik itu dari mereka yang layak dan patut bersaing, atau pun yang sama sekali belum layak untuk bersaing.

Dalam hal ini, tergambar jelas juga bahwa kita melihat kesejahteraan masyarakat lagi-lagi terganggu oleh karena fenomena pandemi, dan fenomena peningkatan jumlah usia produktif di Riau. Hal ini semakin mengerucut dan dapat dijelaskan pada penjabaran wawancara berikutnya. Nantinya, melalui wawancara kita akan melihat benang merah antara bagaimana kondisi kejahatan harta benda di provinsi Riau, dampak dan pengaruhnya terhadap bonus demografi, dan apa solusi agar perkembangan kejahatan harta benda ini dapat dianulir jika pada suatu-waktu masuk kepada gejolak masyarakat yang tidak diinginkan. Dalam pengerucutan penjabaran hasil penelitian ini kita dapat baca melalui wawancara dengan *key informan*.

Secara Spesifik, melalui wawancara langsung kepada *key informan*, kita dapat memahami Bersama bagaimana notabene dari permasalahan kejahatan harta benda di Provinsi Riau didasarkan kepada kondisi kesejahteraan masyarakat yang stabilitasnya perlu untuk dipertahankan dari masa ke masa. Pandangan ini juga perlu dikumandangkan agar setiap *stakeholder*, dapat mengambil kebijakan masing-masing yang dimana dalam kebijakan tersebut tergambar Tindakan-tindakan yang mendukung atau dalam kata lain berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Terbukti bahwa benar adanya dan gambaran tersebut selaras serta menjawab hipotesis peneliti terkait kesejahteraan masyarakatlah yang menjadi kunci dari terantisipasi peningkatan kejahatan harta benda di Provinsi Riau, hingga Riau dapat mencapai puncak bonus

demografi pada tahun 2028-2030. Dalam wawancara ini, peneliti mengonstruksi alur wawancara dengan menekankan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Tanggapan Polda Riau mengenai besarnya pengaruh kondisi kesejahteraan masyarakat terhadap stabilitas sosial sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak positif di dalam keberlangsungan bonus demografi Riau.
- b. Instrumen apa yang digunakan oleh Polda dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat dalam menganulir segala bentuk ancaman peningkatan kejahatan harta benda di fase menuju bonus demografi tahun 2028-2030 mendatang.
- c. Apakah Polda sudah sepenuhnya menjalankan amanat demi kesejahteraan masyarakat itu dengan maksimal.
- d. Pendapat Polda tentang ancaman yang lebih serius yang dapat terjadi jika dalam fase menuju bonus demografi, pihak terkait tidak mengambil tindakan yang tepat.

Adapun beberapa poin penting dari jawaban *key informan* yang mengacu kepada informasi yang dicari dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tanggapan Polda dijelaskan dalam kutipan wawancara berikut ini. *“Sifat manusia itu tidak pernah puas. Banyaknya harta benda dia belum tentu dia sudah merasa puas. Perilaku hati, pikiran dan tangan tidak sejalan dengan rasa tidak puas ini, apapun yang dibuat oleh pemerintah, rancangan*

menuju Indonesia ini bagus, program pemerintah, masa depan yang baik itu sia-sia ketika kita tidak berpangku tangan tidak se-iyek dalam menyikapi apa yang dibuat pemerintah itu bagus atau tidak. Kalau bagus, kenapa kita melesetkan. Pemerintah menciptakan hukum, undang-undang, regulasi-regulasi itu semua bisa berdampak positif dan negatif. Kalau dia positif, dia bisa menarasikan dengan bagus, kalau negatifnya dia membuat suatu perlawanan-perlawanan. Manusia bersifat ambisius, maka hati, pikirannya tidak sejalan. Hal ini lumrah dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk saat ini kejahatan meningkat, dan kita tidak bisa kita tutup mata. Apakah dengan mata kita dapat melihat perkembangan, pembangunan dan menciptakan suatu investasi yang besar di negara kita ini apakah bisa kita hanya dengan menutup mata, tentu tidak bisa. Intinya ketika kita melihat yang bagus, katakan bagus, yang dilihat tidak bagus, katakan tidak bagus. Ketika itu benar katakan itu benar, ketika itu salah katakan itu salah. Ketika masyarakat bisa berpikiran seperti itu, kesadaran akan usaha pemerintah dapat kita lihat, apakah ada kemajuan dari tahun-tahun kemarin, bagaimana kehidupan masyarakat sebelum-sebelumnya. Ketika pemerintah sekarang ini apakah kita hanya tutup mata?"

- b. Dalam menganulir segala bentuk ancaman peningkatan kejahatan harta benda, pemerintah tentunya mengandalkan instrumen hukum, undang-undang serta regulasi.

- c. Polda sudah menjalankan tindakan-tindakan untuk menjaga stabilitas sosial seperti pengelolaan SDM dan terobosan sosialisasi. Namun, Pola mengakui belum optimal dikarenakan adanya perubahan pola.
- d. *“Hukum ini bisa membuat efek jera dan tidak tertutup kemungkinan seseorang yang berperilaku biasa-biasa ketika dihukum bisa meningkatkan pemikiran. Efek jera ketika dia dihukum dengan kepala, hati dan pikiran, dia bisa mengubah niatnya seperti efek jera masuk penjara sehingga membuatnya mengurungkan niatnya untuk berbuat jahat. Sementara dia itu dari mulai perilakunya masih kelas 1 tapi setelah dipenjara bisa meningkat dari perilaku pertama. Kenapa bisa begitu? Karena tidak tertutup banyak perilaku-perilaku yang ditahan. Inilah manusia, hati dan pikiran, tidak semuanya sama. Ada kalanya seseorang dihukum semakin bertambah meningkatnya kejahatannya karena melihat perilaku-perilaku tahanan di lapasnya. Seseorang tidak bisa merubah perilakunya tanpa kesadaran diri sendiri.”*

D. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Modal Belum Memuaskan



Gambar 5. Peringkat Sepuluh Besar Realisasi Investasi PMDN dan PMA Se-Indonesia Tahun 2020

(Sumber: Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Riau)

Pada Tanggal 12 Januari tahun 2022, Peneliti Telah diberikan kesempatan untuk berbincang hangat bersama *key informan* yang berasal dari Dinas Penanaman Modal Provinsi Riau. Situasi tersebut berlangsung dengan hangat, tanpa ada hambatan. Seluruh proses berlangsung dengan begitu hangat, pelayanan terpadu dan kita melihat bahwa kesiapan mereka dalam melayani masyarakat sudah terbilang mapan dan luar biasa. Pada kesempatan penelitian kemarin, peneliti berbincang-bincang hangat dengan narasumber terkait bonus demografi dan hal tersebut lagi-lagi terbukti dan valid.

Bahwa hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini dianggap sebagai suatu kejadian yang sudah terjadi dan sudah ada buktinya. Konfirmasi yang diberikan kepada peneliti dimulai sejak terkait pembahasan sejauh mana modal yang ada di provinsi Riau secara efisien sudah menyerap tenaga kerja dan memberikan angin segar bagi para pencari kerja. Hal tersebut diutarakan setelah sekian panjang kita berputar membahas soal bonus demografi dan bagaimana peran permodalan ini dapat memberikan legitimasi bagi penelitian tersebut. Secara garis besar, beliau menuturkan bahwa mungkin jika konteks terkait kondisi ketenagakerjaan, Dinas Penanaman Modal tidak menggarap secara utuh hal tersebut. Namun perlu diingat bahwa seluruh alur permodalan pada sektor industri dan UMKM adalah menjadi bagian dari Dinas Penanaman Modal dan hal tersebut tentu dapat diakses terkait laporan dari seluruh badan usaha yang telah menggunakan modal dan kesempatan ataupun perizinan dari Dinas Penanaman Modal. Sejauh apa dan seperti apa dana tersebut dimanfaatkan merupakan kesempatan bagi Dinas Penanaman Modal untuk mengukur dan mengonstruksi para pekerja di lapangan.

Skala permodalan dan model usaha tentu memiliki muatan yang sangat signifikan bagi para pekerja. Kita dapat menyaksikan bahwa Riau secara utuh telah menduduki posisi ke-6 sebagai wilayah dengan tingkat investasi tertinggi di Indonesia. Hal tersebut juga termasuk dengan dana investasi asing, yang menginvestasikan segala bentuk dananya ke Riau. Ketika pembahasan berlangsung, peneliti sudah meyakini bahwa Riau adalah wilayah dengan kesempatan kerja yang tinggi oleh karena arus

permodalan yang baik. Namun kenyataan tersebut tidaklah sepenuhnya benar. Disisi kita melihat dana tersebut harus memiliki manajemen tertentu, Dinas Penanaman Modal tentu harus lebih berhati-hati dan memerlukan waktu untuk melihat dan menimbang kemana permodalan itu pergi. Dan hal tersebut justru diperlukan kerja sama dengan *stakeholder*. Kesiapan suatu sektor usaha harus diukur sedemikian rupa jika modal ingin digelontorkan.

Tentu hal ini merupakan bagian dari pembekalan pada sektor SDM juga. Elaborasi hal ini juga dipaparkan oleh *key informan*, dan pada wawancara tersebut peneliti telah menemukan bukti konkret terkait pentingnya kesiapan masyarakat dalam menerima suatu mobilitas. Dalam wawancara tersebut, peneliti membahas terkait:

- a. Bagaimana peran Dinas Penanaman Modal dalam bonus demografi
- b. Siapa *stakeholder* dalam pandangan dinas penanaman modal terkait bonus demografi
- c. Solusi agar kita semua mampu melewati fase itu bersama-sama.

Key informan yang merupakan salah satu staf ahli Dinas Penanaman Modal turut memberikan poin-poin penting yang sekiranya mendukung pembahasan peneliti di atas. Hasilnya adalah sebagai berikut:

- a. Peran Dinas Penanaman Modal saat ini ada dalam bentuk dukungan, pembinaan dan pengawasan. Hal ini didukung oleh pernyataan narasumber
“Kita sebagai BPMTSP di Provinsi Riau terus menggiring investor untuk

masuk ke Provinsi Riau menanamkan investasinya dari segala macam sektor. Sebagai contoh proyek pembangunan jalan tol Provinsi Riau yang mendatangkan investor-investor. Proyek pembangunan seperti ini secara langsung memberikan lapangan kerja bagi angkatan produktif dan dari pihak BPMTSP sendiri mengusahakan agar investor merekrut tenaga kerja lokal. Jadi, selain menggali potensi dan keuntungan di Riau, mereka juga dapat memberikan dampak dan manfaat. BPMTSP juga sering melakukan pengawasan dan pembinaan ke perusahaan-perusahaan terkait kemitraan yang dilakukan di daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya melibatkan masyarakat dan angkatan produktif yang bekerja di sektor-sektor..”

- b. Beberapa pihak yang dipercaya sebagai *stakeholder* terkait bonus demografi di Riau yaitu investor asing, pemerintah, UKM yang tersebar pada daerah-daerah dan tentunya para angkatan kerja itu sendiri.
- c. Pihak Dinas Penanaman Modal menjelaskan bahwa situasi saat ini cukup fluktuatif. Hal ini didukung oleh penjelasan narasumber “*Saat pandemi sekarang ini, bisa dikatakan bahwa kondisinya sangat fluktuatif bahkan cenderung menurun. Oleh karena itu, BPMTSP tentunya berharap akan ada terus lapangan pekerjaan baru untuk meningkatkan angka serapan kerja. BPMTSP juga selalu melakukan pengawasan terutama kegiatan penanaman modal*”. Menurut narasumber, solusi agar dapat melewati fase bonus demografi bersama-sama adalah untuk tetap *update* dengan perkembangan zaman yang sudah semakin canggih dan modern. Selain itu,

masyarakat bersama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada di tengah masyarakat juga diharapkan untuk memiliki kerja sama yang baik guna meningkatkan kesejahteraan dalam menyambut puncak bonus demografi

E. Penjabaran

Dalam konteks teori Anomie, kita melihat bahwa situasi kesenjangan dan situasi yang tidak berpihak kepada masyarakat akan menimbulkan gejolak-gejolak yang buruk. Semakin masyarakat berada dalam satu tekanan, maka semakin besar kemungkinan masyarakat mencari cara agar ia keluar dari tekanan tersebut. Tekanan yang dimaksud adalah Ketika masyarakat tidak lagi mengindahkan pranata sosial sebagian suatu yang membatasi. Membawa hal ini berdasarkan fakta-fakta yang ada, secara merata Polda telah menyatakan bahwa hampir seluruh dari situasi masyarakat Riau memiliki masalah yang sama yaitu kesejahteraan masyarakat yang tidak diperhatikan secara mendalam. Memang ada batasan suatu pihak dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, namun dalam hal ini, tentu tidaklah baik jika setiap pihak terkait mendalilkan alasan ini guna menghindari tugas-tugas yang mengharuskan mereka berpihak penuh kepada masyarakat. Potensi ini dirasa baik untuk dikaji lebih dalam di kesempatan berikutnya terkait sejauh apa keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat dan apa manifestasi nyata bagi masyarakat. Pembuktian ini tentu memerlukan variabel seperti data-data *historical* program pemerintah yang sudah terimplementasi bagi masyarakat. Mengingat hal ini tentu dihitung penting, kita

kembali menilik dua *statement* dari *key informan* yang mengatakan kesejahteraan masyarakat adalah variabel utama. Tentu melalui teori yang ada, kita dapat menyimpulkan kiranya:

- Kesulitan bersaing di dalam dunia pekerjaan masyarakat, keterbelakangan teknologi, kemampuan, dan informasi lainnya tentu menjadi faktor utama. Dan puncak dari situasi ini berada pada situasi Covid-19 yang kita hadapi sekarang ini yang dimana situasi terbut telah menimbulkan efek yang sangat fatal bagi kesejahteraan masyarakat. Telah tercatat bahwa ekonomi Indonesia bahkan telah mencapai kemunduran terburuknya pada 150 tahun terakhir ini. Bisa dibayangkan jika dampak tersebut sangat mempengaruhi masyarakat secara umum, terutama sektor sosial ekonomi.
- Hal ini semakin sempurna karna penetrasi yang tidak maksimal dari Lembaga-lembaga terkait yang sejatinya menjadi contoh dalam memberikan keberpihakannya pada kesejahteraan masyarakat alias tidak hanya menjalankan program wajib berdasarkan porsi yang statis. Dalam hal ini sejatinya masyarakat berpotensi untuk memberikan aktualisasi bagi masyarakat dalam membekali sekurang-kurangnya informasi terkait situasi sosial-ekonomi wilayah Riau, kiat-kiat bersaing dalam panggung ekonomi, serta bantuannyata bagi masyarakat. Harapan tersebut sejatinya dapat diimplementasikan oleh *stakeholder* agar semua aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat dapat terjamin.

Berdasarkan teori di atas, kita telah menemukan konfirmasi dari dua *key informan* yang betul-betul menyatakan rasa tidak puas terhadap apa yang terjadi baik pada sektor permodalan industri hingga UMK, serta penanganan terjaminnya sosial ekonomi masyarakat dan kesejahteraan yang ditangani oleh Polda. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk konkret tersebut ditunjukkan melalui data kejahatan harta benda yang cenderung meningkat dikarenakan kesejahteraan yang masih harus diperhatikan dan penyerapan tenaga kerja berdasarkan perputaran modal yang ada di Riau sepenuhnya belum mencapai titik kepuasan. Terkait rasa tidak puas tersebut, ada banyak faktor penentu yang menjadikan hal tersebut konkret, di antaranya adalah:

- Program pemerintah yang belum sepenuhnya terlaksana
Kita masih merasakan bahwa sepenuhnya kendala tidak berada pada tangan pemerintah. Kita mengerti bahwa dalam prosesnya, pemerintah masih dalam tahap usaha untuk melaksanakan programnya dengan maksimal. Namun tidak dapat dipungkiri, setiap program tentu punya jangka waktu kerjanya masing-masing, sehingga titik temu antar satu program dengan program yang lain tidak pernah sinkron dikarenakan durasi kerja yang berbeda-beda. Seperti yang dijelaskan oleh *key informan* bahwa setiap modal yang diberikan tentu harus diputar dan harus dilihat sejauh mana modal tersebut dapat berputar serta memerlukan proses hingga modal tersebut memasuki konteks penyerapan tenaga kerja di Riau.
- Lapangan terjal dan kendala teknis

Demografi Riau tentu terbilang variatif. Dapat dikatakan bahwa Riau sendiri belum sepenuhnya menjadi wilayah perkotaan maju. Masih terdapat desa-desa dan wilayah-wilayah terpencil yang mengakibatkan sulitnya masuk penetrasi pemerintah. Jangankan penetrasi pemerintah, kita masih dapat menemukan ada wilayah yang belum terjamah listrik dan internet. Hal ini merupakan kendala yang buruk yang sejatinya miris jika mengingat keadaan peradaban kita yang terbilang modern. Adanya perbedaan kondisi ini membuat banyak sekali kemunduran di berbagai wilayah di Riau. Dalam hal ini informasi yang diperoleh oleh informan yaitu badan Pusat Statistik Provinsi Riau, masyarakat Riau sejatinya berada pada tahap pembangunan infrastruktur dengan kondisi 12 kabupaten kota yang masih dalam proses pengajuan untuk memberikan bantuan internet dan listrik kepada pihak terkait secara bertahap dan berkala

Elaborasi dari semua penjelasan ini mengacu kepada kiat kesadaran yang harus kita bangun. Kita harus mewaspadai dua variabel utama yang dimana variabel-variabel tersebut memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat Riau terkait pesta Bonus Demografi tahun 2018-2030. Bonus Demografi tidak hanya berbicara tentang keuntungan, tetapi Sebagian besar harus pandang dalam konteks kesiagaan. Siaga dalam hal ketahanan sosial-ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Ketahanan Sosial ekonomi adalah variabel pertama yang menjadi topik pembahasan kali ini. Anomie,

memberikan kita sebuah gambaran konkret bahwa sejatinya, tidak menutup kemungkinan, kondisi destruktif dan masif dapat terjadi dari dalam kelompok itu sendiri. Kita memang memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ia menggantungkan dirinya kepada orang lain agar kebutuhannya dapat di penuhi. Tumpang tindih antar kepentingan ini adalah modal awal dari perpecahan yang dimaksud di dalam Anomie.

Sewaktu-waktu ketika keberpihakan kepada masyarakat menurun, situasi semakin sulit, ketersediaan lapangan kerja merosot, sektor industri terbatas, dan jurang yang dalam antar masyarakat dalam hal pengetahuan serta teknologi memberikan manifestasinya, maka tidak menutup kemungkinan Anomie akan berubah menjadi *chaos*. Hal ini tentu hal yang sederhana untuk dipahami, oleh karena semakin kecil kemungkinan untuk bertahan, maka tekanan dalam hidup individu semakin besar. Semakin kecil kesempatan memenuhi kebutuhan, maka semakin besar kesempatan untuk manusia menghalalkan cara-cara yang lain agar dapat memenuhi kebutuhannya. Hal ini sangat fundamental untuk dipikirkan bersama-sama. Namun tidak banyak ditemukan bahwa pihak-pihak terkait menjadikan ini tolak ukur dalam konteks bonus demografi saat ini. Berbicara soal bonus demografi, banyak orang cenderung lupa (tidak menutup kemungkinan pihak terkait) bahwa menjadikan situasi ini tolak ukur adalah hal terpenting yang dapat dilakukan oleh karena kita mengingat dalam bonus demografi saat ini, terjadi sebuah lompatan jumlah angka usia produktif di seluruh wilayah di Indonesia termasuk Riau. Ini adalah tanda bahwa kita harus memperhatikan

dengan serius sektor lapangan pekerjaan yang dimana hal ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan berkaitan lagi dengan sistem stabilitas sosial-ekonomi masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat adalah faktor utama mengapa pemerintah sampai saat ini bekerja keras dalam setiap praktik program-program yang ia sudah tetapkan. Masyarakat dapat diibaratkan seperti seseorang yang harus dilayani dalam sebuah tempat pertemuan. Pelayan sejatinya mengerti apa yang masyarakat butuhkan. Hal ini berbicara tentang bagaimana kesiapan hati dan pikiran pihak terkait dalam menaungi kebutuhan masyarakat. Kita mengerti bahwa ancaman lain dari merosotnya kesejahteraan masyarakat adalah masuknya isu lain bak penyusup yang mengacaukan sistem ketahanan sosial. Dapat menemukan banyak konten yang dapat mempengaruhi arah perhatian masyarakat. Terutama jika hal tersebut berpotensi memberikan sensasi pemenuhan kebutuhan bagi hidupnya. Ini merupakan suatu konteks tersendiri yang dapat kita simpulkan dalam penelitian ini. Bahwa sejatinya, semakin gampang menjajah masyarakat ketika sekelompok orang mampu hadir dan memberi keyakinan bahwa mereka dapat memberikan solusi agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Ini erat kaitannya dengan terorisme dan afiliasi lainnya yang berusaha mencuci otak dan terkesan menyadarkan banyak orang akan sebuah jalan cepat guna memenuhi kebutuhannya. Konteks ini adalah ancaman besar bagi masyarakat. Kita melihat dari bonus demografi, begitu banyak variabel yang dapat dimunculkan ditengah-tengah pembahasan ini. Sehingga ini adalah momentum bagi kita semua untuk sama-sama

menyadari, bahwa begitu penting bagi kita untuk memberikan perhatian khusus terhadap apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kali ini.

Lonjakan usia produktif tentu terlihat menguntungkan, namun sebaliknya. Jika kita tidak siap menampung, maka kita akan menemukan implikasi yang lain, yang tidak hanya bersifat destruktif, namun ini mengancam kedaulatan ketahanan dan pertahanan wilayah Riau. Maka penegasan dalam penelitian ini terletak kepada ancaman besar dibalik bonus demografi. Sehingga kita memerlukan kerja sama antar pihak terkait yang sejatinya dianggap memiliki kaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan sosial ekonomi masyarakat. Kita tentu ingin menghindari semua ini, namun fakta telah membuktikan melalui informasi dari Polda Riau yang mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah permasalahan utama dari terganggunya stabilitas sosial di wilayah Riau. Kejahatan bersumber dari kesejahteraan yang terancam. Kita mengakui bahwa Riau berhasil menjejaki posisi ke-6 di Indonesia sebagai kota dengan konteks permodalan tertinggi. Harapan baik bahwa kita melihat adanya satu penyegaran dalam konteks ini, namun sebaliknya kita tidak bisa puas oleh karena hal tersebut masih harus dimaksimalkan. Hukum yang ditegakkan sejatinya telah memberikan dampak yang cukup signifikan. Namun, jika hukum dipandang subjektif, maka kita melihat adanya satu momen tidak bertemunya kepentingan masyarakat setelah peraturan ditetapkan.

Ini mengacu kepada rasa tidak puas yang dirasakan oleh masyarakat sekalipun lembaga penegak hukum meyakini bahwa jawaban terbaik adalah menaati ketetapan

yang telah disepakati oleh pemerintah. Sekedar berbicara tentang peraturan, tidaklah sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kita masih dapat menemukan banyak sekali orang yang pada akhirnya memberontak terhadap ketetapan oleh karena ia merasa bahwa dirinya belum dipuaskan oleh peraturan tersebut.

Maksud dari konteks ini adalah, kita memerlukan tindakan yang progresif dan masif terhadap masyarakat. Hal ini merupakan cita-cita banyak orang termasuk penulis yaitu melihat bagaimana pemerintah secara aktual memberikan progres yang dapat dilihat secara langsung dan spesifik. Tidak hanya terkait pembangunan SDA dan infrastruktur. Namun hal ini dimaksudkan kepada hal-hal yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat seperti akses pembelajaran gratis, akses bantuan modal minim birokrasi, kepengurusan data, legalisir surat-surat pendukung pekerjaan dan kemudahan-kemudahan lain yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada akhirnya kita melihat bahwa sebaik-baiknya sebuah wilayah mempersiapkan dirinya dalam menghadapi bonus demografi tetaplah terhitung terdapat sebuah cela sistem yang dapat menimbulkan berbagai jenis persoalan. Dalam konteks Anomie, kita melihat bahwa sebuah kejadian dapat berpotensi menimbulkan sesuatu di luar dugaan. Potensi kejahatan harta benda yang disinyalir akan menjadi situasi buruk sejatinya tidak akan memberikan dampak baik bagi kita semua jika tidak adanya tingkat kesadaran bahkan dimulai dari masyarakat umum. Sehingga penting memahami tujuan penelitian ini adalah menyoroti dinamika kejahatan harta benda yang sejatinya merupakan salah satu variabel utama yang mempengaruhi efisiensi suatu wilayah dalam melaksanakan pesta bonus demografi. Secara garis besar, situasi Anomie memberikan cela buruk di dalam sistem pertahanan sosial sebuah wilayah. Dengan asumsi menurunnya stabilitas sosial akibat kesejahteraan sosial yang merosot, kita akan menemukan berbagai jenis penetrasi dan ancaman akan menjadi bagian kita di kemudian hari. Untuk menganulir semua ini, kita harus bersama-sama mencegah dan memahami situasinya dan mengerti secara struktural setiap simpul-simpul dari konteks demografi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi.

Mengingat betapa buruknya ketika kita memberikan cela kepada masyarakat melalui sistem pertahanan sosial yang buruk, seharusnya ini merupakan sebuah bagian

penting untuk dipelajari oleh pihak-pihak yang berkonsentrasi kepada sistem keamanan dan pertahanan nasional. Potensi Anomie sejatinya adalah gerbang awal kejatuhan dari tingginya persaingan masyarakat. Kejahatan jalan dan sifat arogansi yang menjadi tren adalah ancaman terbesar yang akan menghantui banyak orang. Selain itu, melalui bonus demografi ini, kita telah menemukan relevansi yang sangat berarti dalam kondisi kejahatan harta benda terhadap efisiensi keberlangsungan bonus demografi. Dalam penelitian ini kita telah melihat bahwa hal yang paling menentukan stabilitas masyarakat adalah kerja sama pihak terkait yang berfokus kepada kesejahteraan umum. Dimana di dalamnya termasuk perputaran dana investasi di dalam masyarakat sehingga pergerakan sektor industri dapat beroperasi dengan lancar, regulasi yang mendukung masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya serta kerja sama lembaga penegak hukum dalam mengayomi masyarakat.

Semua lembaga terkait tentunya harus berada pada frekuensi yang sama dalam konteks bonus demografi yang tentunya juga hal itu sudah diingatkan oleh Bappenas melalui surat pernyataan tentang bonus demografi yang akan berlangsung di seluruh wilayah Indonesia dan pernyataan presiden terus menerus mengumandangkan visi-misi yang berfokus kepada pembangunan sektor sumber daya manusia guna menyongsong bonus demografi yang mengalami puncaknya di tahun 2028-2030.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Saran Kepada Pemerintah

Menciptakan nuansa kerjasama antar lembaga sejatinya kunci dari situasi ini. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentu ingin Indonesia mengalami akselerasi . Dimana, melalui hal tersebut kita dapat melihat keuntungan besar. Di samping itu, kita dapat mengerti bahwa dalam fase ini kita semua berada dalam fase kritis. Dimana jika keputusan pemerintah tidak tepat maka niscaya sesuatu yang tidak diinginkan dapat terjadi. terutama dalam sistem pertahanan masyarakat, Secara spesifik pada poros sosial ekonomi. Hal ini adalah hal yang paling rentan untuk disusupi banyak hal. Maka dari itu, pemerintah sejatinya harus memberikan perhatian khusus untuk situasi ini.

2. Saran Kepada Lembaga Pendidikan

Bentuk nyata lembaga pendidikan dalam memberikan perhatian khusus terkait situasi ini adalah mengembangkan riset dan mengembangkan segala materi pembelajaran terkait bonus demografi serta implikasi nya. Mempersiapkan masyarakat dalam situasi ini adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Tidak hanya itu, memastikan masyarakat sudah ada dalam satu pemahaman yang benar terkait bonus demografi ini merupakan salah satu cara utama agar kita semua dapat sadar keadaan dan mampu mengambil keputusan. *Tension* dan bobot konten terkait bonus demografi

harus tersampaikan secara baik. Dan harapan itu juga disambut dengan meluasnya konten terkait bonus demografi itu sendiri ditengah-tengah masyarakat

3. Saran Kepada Masyarakat

Penting untuk menyadari bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang memiliki jumlah manusia lebih banyak dari negara lain. Untuk itu, kita sejatinya juga sadar bahwa bonus demografi adalah hal yang nyata-nyata sudah terjadi di depan mata kita. Lebih dari 80% jumlah angka usia produktif di Riau akan kita saksikan bersama-sama dalam beberapa waktu mendatang dan hal tersebut bukan sesuatu yang dapat dianggap sepele. Kita harus sadar bahwa semua ini akan mengancam eksistensi kita dalam dunia pekerjaan jika kita tidak bersiap-siap untuk bersaing dalam panggung pekerjaan. Maka dari itu, kita sebaiknya jangan menganggap rendah informasi terkait bonus demografi dan terus pastikan diri kita telah mendapatkan informasi yang tepat terkait bonus demografi. Penelitian ini merupakan salah satu sumber informasi yang valid yang dapat masyarakat pakai untuk mengaktualisasi diri tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan bonus demografi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Berg L. Bruce. (2011). Qualitative Research Method For The social Sciences. USA: A Pearson Education Company.
- Carrabine Eamonn, Cox Pam, Lee Maggy, Plummer Ken, South Nigel. (2009). Criminology A Sociological Introduction. London and USA: Routledge
- Deflem Mathieu. (2006). Sociological Theory and Criminological Research. Views From Europe and The United States. Netherlands: Elsevier
- Edukasi 4.0 dan Revolusi Bisnis 4.0. Semarang: Genesis
- Gadjah Mada University Press. (2020) New Normal. Perubahan Social Ekonomi dan Politik akibat Covid-19. Jogja: Gadjah Mada University Press
- Indah, M. (2014). Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi. Jakarta: Kencana Group.
- Oxford Advanced Learner's Dictionary. International Student's Edition 9th edition. London: Oxford University Press International Student's Edition 9th Edition
- Piros D. Christopher, Pinto E. Jerald. (2013). Economic For Investment Decision Makers. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken
- Rice. K. Stephen, Maltz D. Michael/ (2018). Doing Ethnography in Crime. Discovery Through Fieldwork. Switzerland: Springer International Publishing AG

Ritzer George, Dean Paul. (2019). Globalization The Essentials. USA: John Wiley and Sons. Inc

Ritzer George. (2011). Sociological Theory. USA: The Mcgraw Hill Company

Rom N. William. (2012). Environmental Policy and Public Health. Air Pollution Global Climate Change, and wilderness. USA: John Wiley and Sons, inc.

Savitri Astrid. 2019. Bonus Demografi 2030: Menjawab tantangan dan Peluang

Siegel. J. Larry. (2016). Criminology Theory, Patterns, and Typologies. USA: Cengage Learning.

Taylor & Francis GroupMerton K, Robert. (1968). Social Theory and Social Structure. USA: A Division of Maemillan Publishing Co.,Inc.Oxford. 2019.

Wines Howard Frederick. (2010). Punishment and Reformation: A Study of The Penitentiary System. USA. FQ Legacy Book

Undang-Undang

Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Jurnal

Aromsin Mutik, Septyani Rusi, Prio Aris, Santoso Agus. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. Fakuultas Ilmu Kesehatan Universitas duta Bangsa Surakarta

Cohen, Lawrance E, and Felson. (1979). Social Echange and crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. Amcerican Sociological Review. Vol. 44, No. 4.

Grabosky, Peter. Virtual Criminally: old Wine in New Bottles?. Australian Institute of Criminology, Australia

Mardodo. (2015) Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. (Studi di Polres Malang). Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Brawijaya.

Prakoso Teguh Erik, Prasasti Suci,. (2020). Karakter dan perilaku Miilenial: Peluang atau Ancaman Bonus Demografi. Universtas Tunas Pembangunan Surakarta

Website

Badan Pusat Statistik pada 20 Maret 2021 dan 15 Januari 2022, dari <https://www.bps.go.id/>

Sukmana, Y. (2021). *Sri Mulyani: Kondisi Ekonomi 2020 Terburuk Dalam 150 Tahun Terakhir* pada 2 Februari 2022 dari

<https://money.kompas.com/read/2021/04/06/173100226/sri-mulyani-kondisi-ekonomi-2020-terburuk-dalam-150-tahun-terakhir?page=all.com//>

Triono, S. (2016). *Jokowi: Bonus Demografi Bisa Jadi Berkah atau Bencana*. pada 15

Maret 2021 dari <http://www.liputan6.com/healthy/read/4090171/jokowi-bonus-demografi-adalah-tantangan-dan-kesempatan-besar> Diakses pada 15.com//

